DINAS PERDAGANGAN,KOPERASI,USAHA KECIL MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN

KABUPATEN LUWU TIMUR

PEDOMAN PERENCANAAN KINERJA TAHUN 2025

DISDAGKOPRINUM

## KATA PENGANTAR

Dalam rangka mendukung Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang baik berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah, Disdagkoprinum Kab. Luwu Timur terus mempertahankan dan meningkatkan kualitas SAKIP salah satunya dengan membuat suatu pedoman Perencanaan kinerja pada Lingkup Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Tahun 2025.

Pedoman/panduan ini disusun guna memberikan pedoman yang jelas kepada seluruh ASN lingkup Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kab. Luwu Timur dalam melakukan perencanaan kinerja yang pada akhirnya diharapkan kinerja perangkat daerah dapat lebih ditingkatkan dan penyamaan persepsi mengenai hal-hal yang akan dicapai pada Tahun 2025.

Terima kasih kami sampaikan kepada semua pihak yang terkait dalam rangka pelaksanaan SAKIP yang lebih baik.

Malili, Januari 2025

KEPALA DINAS,

SENFRY OKTOVIANUS, S.STP. MPA

## DAFTAR ISI

[BAB I. PENDAHULUAN 1](#_TOC_250000)

[Latar Belakang 1](#_bookmark0)

[Maksud dan Tujuan](#_bookmark1) 5

[Ruang Lingkup](#_bookmark2) 5

[Dasar Hukum](#_bookmark3) 5

[Pengertian/ Istilah](#_bookmark4) 6

[BAB II. PERENCANAAN KINERJA TAHUN 2025](#_TOC_250000) 11

[2.1. Rencana Kinerja Tahun 2025](#_bookmark5) 11

[Rancangan Awal RKPD Tahun 2025](#_bookmark6) 11

[Rancangan Akhir Renja Disdagkoprinum Tahun 2025 16](#_bookmark7)

[Rencana Kinerja Tahunan (RKT) DISDAGKOPRINUM Tahun 2025](#_bookmark8) 24

[BAB III. PELAKSANAAN KINERJA](#_TOC_250000) 32

[BAB VI. PENUTUP](#_TOC_250000) 33

[\_bookmark0](#_bookmark0)

## BAB I PENDAHULUAN

#### Latar Belakang

Perencanaan kinerja merupakan proses penyusunan rencana kinerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rencana stratejik, yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah melalui berbagai kegiatan tahunan. Didalam rencana kinerja ditetapkan rencana capaian kinerja tahunan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan.

Penyusunan rencana kinerja dilakukan seiring dengan agenda penyusunan dan kebijakan anggaran, serta merupakan komitmen bagi instansi untuk mencapainya dalam tahun tertentu.

Undang-undang No 25 Tahun 2004 tentan Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional telah mewajibkan setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk menyusun Rencana Kerja (Renja) OPD sebagai pedoman kerja selama periode 1 (satu) tahun dan berfungsi untuk menterjemahkan perencanaan strategis lima tahunan yang dituangkan dalam Renstra OPD kedalam perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional.

### Komponen rencana kinerja

Perencanaan kinerja merupakan proses dimana atasan dan bawahan bekerja bersama merencanakan apa yang harus dilakukan dalam setahun mendatang, mendefinisikan dan merencanakan, mengatasi hambatan dan mendapatkan saling pengertian tentang pekerjaan. Perencanaan kinerja digunakan untuk melihat masa depan untuk memaksimalkan kinerja yang akan datang dan bukan menganalisis kinerja yang lalu.

Dokumen rencana kinerja memuat informasi tentang: sasaran yang ingin dicapai dalam tahun yang bersangkutan; indikator kinerja sasaran, dan rencana capaiannya.selain itu dimuat pula keterangan yang antara lain menjelaskan keterkaitan kegiatan, dengan sasaran, kebijakan dengan programnya, serta keterkaitan dengan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi/ sektor lain.

Adapun komponen rencana kinerja meliputi :

Sasaran

Sasaran  yang dimaksud pada rencana kinerja ini adalah sasaran sebagaimana dimuat dalam dokumen renstra. selanjutnya diidentifikasi sasaran mana yang akan diwujudkan pada tahun yang bersangkutan beserta indikator dan rencana tingkat capaiannya (targetnya)

Program

Program-program yang ditetapkan merupakan program-program yang berada dalam lingkup kebijakan tertentu sebagaimana dituangkan dalam strategi yang diuraikan pada dokumen rencana strategi. selanjutnya perlu diidentifikasi dan ditetapkan program-program yang akan dilaksanakan pada tahun bersangkutan, sebagai cara untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan

Kegiatan

Kegiatan adalah tindakan nyata dalam jangka waktu tertentu yang dilakukan oleh instansi pemerintah sesuai dengan kebijakan dan program yang telah ditetapkan dengan memanfaatkan sumber daya yang ada untuk mencapai sasaran dan tujuan tertentu. dalam komponen kegiatan ini perlu ditetapkan indikator kinerja kegiatan dan rencana capaiannya

Indikator kinerja kegiatan

Indikator kinerja ialah ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan yang telah ditetapkan. indikator kinerja kegiatan yang akan ditetapkan dikategorikan kedalam kelompok:

**Masukan (inputs)** adalah segala sesuatu yang dibutuhkan agar pelaksanaan kegiatan dan program dapat berjalan atau dalam rangka menghasilkan output, misalnya sumber daya manusia, dana, material, waktu, teknologi, dan sebagainya.

**Keluaran (outputs)** adalah segala sesuatu berupa produk/ jasa (fisik dan atau non fisik) sebagai hasil langsung dari pelaksanaan suatu kegiatan dan program berdasarkan masukan yang digunakan.

**Hasil (outcomes)** adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran kegiatan pada jangka menengah.outcomes merupakan ukuran seberapa jauh setiap produk/ jasa dapat memenuhi dan harapan masyarakat.

**Manfaat (benefits)** adalah kegunaan suatu keluaran (outputs) yang dirasakan langsung oleh masyarakat.dan dapat berupa tersedianya fasilitas yang dapat diakses oleh publik

**Dampak (impact)** adalah ukuran tingkat pengaruh sosial, ekonomi lingkungan atau kepentingan umum lainnya yang dimulai oleh capaian kinerja disetiap indikator dalam suatu kegiatan.

Indikator-indikator tersebut secara langsung atau tidak langsung dapat mengindikasi sejauh mana keberhasilan pencapaian sasaran.dalam hubungan ini, penetapan indikator kinerja kegiatan merupakan proses identifikasi, pengembangan, seleksi dan konsultasi tentang indikator kinerja atau ukuran kinerja atau ukuran keberhasilan kegiatan dan program-program instansi.

Penetapan indikator kinerja kegiatan harus didasarkan pada perkiraan yang realistis dengan memperhatikan tujuan dan sasaran yang ditetapkan serta data pendukung yang harus diorganisasi, indikator kinerja dimaksud hendaknya (1) spesifik dan jelas , (2) dapat diukur secara objektif, (3) relevan dengan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai,dan (4) tidak bias.

### Manfaat dari Perencanaan Kinerja

Perencanaan kinerja merupakan hal yang penting karena mencakup fungsi, tugas, peran, serta menentukan standar kinerja pada perangkat daerah. Berikut ini terdapat 4 manfaat yang bisa dirasakan yaitu :

**Menjelaskan dan merinci tujuan yang ingin dicapai**

Memberikan pegangan dan menetapkan kegiatan-kegiatan yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan tersebut

Organisasi memperoleh standar sumber daya terbaik dan mendayagunakan sesuai tugas pokok fungsi yang telah ditetapkan

Menjadi rujukan anggota organisasi dalam melaksanakan aktivitas yang konsisten prosedur dan tujuan

Memberikan batas wewenang dan tanggung jawab bagi seluruh pelaksana

Memonitor dan mengukur berbagai keberhasilan secara intensif sehingga bisa menemukan dan memperbaiki penyimpangan secara dini.

Memungkinkan untuk terpeliharanya persesuaian antara kegiatan internal dengan situasi eksternal

Menghindari pemborosan

#### Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan dibuatnya pedoman perencanaan kinerja ini antara lain sebagai:

Dalam rangka peningkatan kinerja perangkat daerah secara berkelanjutan

Untuk meningkatkan motivasi dan komitmen kerja ASN

untuk menciptakan lingkungan di mana ASN dapat melakukan pekerjaan dengan kualitas terbaik secara efektif dan efisien;

Untuk pengembangan kemampuan pegawai, peningkatan kepuasan kerja serta pencapaian potensi diri yang bermanfaat bagi individu dan perangkat daerah.

untuk memastikan bahwa semua elemen OPD bekerja bersama secara terpadu untuk mencapai tujuan OPD.

#### Ruang Lingkup

Pedoman Perencanaan Kinerja lingkup Disadgkoprinum Kab. Luwu Timur ini meliputi pengaturan:

Perencanaan Jangka Menengah; dan

Perencanaan Jangka Pendek.

#### Dasar Hukum

Pedoman Perencanaan Kinerja Lingkup Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Tahun 2025 ini disusun berdasarkan:

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah tentang rencana pembangunan jangka menengah daerah, serta tata cara perubahan rencana pembangunan jangka panjang daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah dan rencana kerja pemerintah daerah;

#### Pengertian/ Istilah

**Perencanaan** merupakan suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia.

**Kinerja** adalah unjuk kerja/hasil kerja/keluaran/hasil dari kegiatan/program yang hendak atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas terukur.

**Kinerja Instansi Pemerintah** adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian sasaran ataupun tujuan instansi pemerintah sebagai penjabaran dari visi, misi, dan strategi instansi pemerintah yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan.

**Akuntabilitas Kinerja** adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah di amanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran/target kinerja yang telah ditetapkan melalui laporan kinerja instansi pemerintah yang disusun secara periodik.

**Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)** adalah rangkaian sistematik dari berbagai komponen, alat, dan prosedur yang dirancang untuk mencapai tujuan manajemen kinerja, yaitu perencanaan, penetapan kinerja dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah.

**Perencanaan Strategis (Renstra),** adalah merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1(satu) sampai dengan 5 (lima) tahun secara sistematis dan berkesinambungan dengan memperhitungkan potensi, peluang, dan kendala yang ada atau yang mungkin timbul. Proses ini menghasilkansuatu rencana strategis instansi pemerintah, yang setidaknya memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, dan program serta ukuran keberhasilan dan kegagalan dalam pelaksanaannya.

**Perencanaan Kinerja** adalah merupakan proses penetapan kegiatan tahunan dan indikator kinerja berdasarkan program, kebijakan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rencana strategis. Hasil dari proses ini berupa rencana kinerja tahunan.

**Pengukuran Kinerja** adalah merupakan proses sistematis dan berkesinambungan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, kebijakan, sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi, misi dan strategi instansi pemerintah. Proses ini dimaksudkan untuk menilai pencapaian setiap indikator kinerja guna memberikan gambaran tentang keberhasilan dan kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran. Selanjutnya dilakukan pula analisis akuntabilitas kinerja yang menggambarkan keterkaitan pencapaian kinerja kegiatan dengan program dan kebijakan dalam rangka mewujudkan sasaran, tujuan, visi dan misi sebagaimana ditetapkan dalam rencana strategis.

**Indikator Kinerja Utama (*Key Performance Indicator*)** adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis organisasiProgram adalah penjabaran kebijakan kementerian negara/lembaga dalam bentuk upaya yang berisi satu atau beberapa kegiatan dengan menggunakan sumberdaya yang disediakan.

**Kegiatan** adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa satuan kerja sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumberdaya baik yang berupa personil (sumberdaya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau ke semua jenis sumberdaya tersebut sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang dan jasa;

***Output*** (keluaran) adalah tolak ukur kinerja berdasarkan produk dari suatu kegiatan yang dihasilkan dari program atau kegiatan sesuai dengan masukan yang digunakan;

***Outcome*** (hasil) adalah tolak ukur kinerja berdasarkan tingkat keberhasilan yang dapat dicapai berdasarkan keluaran program atau kegiatan yang sudah dilaksanakan.

**Perencanaan Kinerja** adalah merupakan proses penetapan kegiatan tahunan dan indikator kinerja berdasarkan program, kebijakan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rencana strategis. Hasil dari proses ini berupa rencana kinerja tahunan.

**Pengukuran Kinerja** adalah merupakan proses sistematis dan berkesinambungan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, kebijakan, sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi, misi dan strategi instansi pemerintah. Proses ini dimaksudkan untuk menilai pencapaian setiap indikator kinerja guna memberikan gambaran tentang keberhasilan dan kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran. Selanjutnya dilakukan pula analisis akuntabilitas kinerja yang menggambarkan keterkaitan pencapaian kinerja kegiatan dengan program dan kebijakan dalam rangka mewujudkan sasaran, tujuan, visi dan misi sebagaimana ditetapkan dalam rencana strategis.

**Indikator Kinerja Utama (*Key Performance Indicator*)** adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis organisasiProgram adalah penjabaran kebijakan kementerian negara/lembaga dalam bentuk upaya yang berisi satu atau beberapa kegiatan dengan menggunakan sumberdaya yang disediakan.

**Kegiatan** adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa satuan kerja sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumberdaya baik yang berupa personil (sumberdaya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau ke semua jenis sumberdaya tersebut sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang dan jasa;

***Output*** (keluaran) adalah tolak ukur kinerja berdasarkan produk dari suatu kegiatan yang dihasilkan dari program atau kegiatan sesuai dengan masukan yang digunakan;

***Outcome*** (hasil) adalah tolak ukur kinerja berdasarkan tingkat keberhasilan yang dapat dicapai berdasarkan keluaran program atau kegiatan yang sudah dilaksanakan.

## BAB II PERENCANAAN KINERJA TAHUN 2025

#### 2.1. Rencana Kerja Tahun 2025

Pada Tahun 2025 Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian merencanakan 15 program, 25 kegiatan dan 55 sub kegiatan dengan pagu indikatif Rp. **30.594.567.596**,-. Alokasi program, kegiatan dan sub kegiatan serta indikasi pendanaan Rencana Kerja Tahun 2025 Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian dapat dilihat pada tabel berikut :

**Rancangan Awal RKPD Tahun 2025**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | |  | | **Tabel. 2.4** | | | | | | | | | | |
|  | |  | | (Tabel T-C. 31, Lampiran Permendagri 86 Tahun 2017) | | | | | | | | | | |
|  | |  | | Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2025 | | | | | | | | | | |
|  | |  | | **Kabupaten Luwu Timur** | | | | | | | | | | |
|  | |  | |  | | | | | | | | | | |
|  | |  | | OPD : DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN | | | | | | | | | | |
| **NO** | | **Rancangan Awal RKPD** | | | | | | | | **Hasil Analisis Kebutuhan** | | | | | | | **Catatan Penting** |
| **Program/Kegiatan**  **/Sub Kegiatan** | | | | **Indikator Kinerja** | **Lokasi** | **Target Capaian Kinerja** | **Kebutuhan Dana** | **Program/ Kegiatan/**  **Sub Kegiatan** | | **Indikator Kinerja** | **Lokasi** | **Target Capaian Kinerja** | **Kebutuhan Dana** | |
| **I** | | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA** | | | | **Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar** |  | 98% | 4,819.244.497 | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA** | | **Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar** |  | 100% | 5.123.244.497 | |  |
| **1** | | **Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah** | | | | **Persentase penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran & evaluasi tepat waktu ('%)** | **DISDAGKOPRINUM** | **100%** | **86.031.800** | **Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah** | | **Persentase penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran & evaluasi tepat waktu ('%)** | **DISDAGKOPRINUM** | **100%** | **136.951.800** | |  |
|  | | **-** | | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah |  | 10 laporan | 33.881.300 | **-** | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah |  | 10 laporan | 33.881.300 | |  |
|  | | **-** | | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | | Jumlah dokumen RKA- SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen RKA-SKPD |  | 2 dokumen | 3,112.300 | **-** | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | Jumlah dokumen RKA- SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen RKA-SKPD |  | 2 dokumen | 3.112.300 | |  |
|  | |  | | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | Jumlah dokumen Perangkat daerah |  | 3 dokumen | 45.928.200 |  | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah dokumen Perangkat daerah |  | 3 dokumen | 95.928.200 | |  |
|  | | **-** | | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | | Jumlah dokumen DPA- dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen DPA-SKPD |  | 2 dokumen | 3.110.000 | **-** | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | Jumlah dokumen DPA- dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen DPA-SKPD |  | 2 dokumen | 3.110.000 | |  |
| **2** | | **Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** | | | | **Persentase administrasi keuangan yang terselenggara dengan baik** | **DISDAGKOPRINUM** | **100%** | **3.838.880.077** | **Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** | | **Persentase administrasi keuangan yang terselenggara dengan baik** | **DISDAGKOPRINUM** | **100%** | **3.830.880.077** | |  |
|  | | **-** | | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD | | Jumlah laporan keuangan bulanan/ triwulanan/ semesteran SKPD dan laporan koordinasi penyusunan laporang keuangan bulanan/triwulan/semesteran SKPD |  | 18 laporan | 115.521.800 | **-** | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD | Jumlah laporan keuangan bulanan/ triwulanan/ semesteran SKPD dan laporan koordinasi penyusunan laporang keuangan bulanan/triwulan/semesteran SKPD |  | 18 laporan | 115.521.800 | |  |
|  | | **-** | | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | | Jumlah orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN |  | 28 orang/bulan | 3.715.358.277 | **-** | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN |  | 28 orang/bulan | 3.715.358.277 | |  |
| **3** | | **Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah** | | | | **Persentase BMD yang Diadministrasikan sesuai standar ('%)** | **DISDAGKOP-UKM** | **100%** | **35.525.000** | **Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah** | | **Persentase BMD yang Diadministrasikan sesuai standar ('%)** | **DISDAGKOP-UKM** | **100%** | **35.525.000** | |  |
|  | | **-** | | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | | Jumlah laporan penatausahaan barang milik daerah pada SKPD |  | 2 dokumen | 35.525.000 | **-** | Penatausaha an Barang Milik Daerah pada SKPD | Jumlah laporan penatausahaan barang milik daerah pada SKPD |  | 2 dokumen | 35.525.000 | |  |
| **4** | | **Kegiatan Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah** | | | | **Persentase Realisasi Pendapatan Daerah Kewenangan PD ('%)** | **DISDAGKOPRINUM** | **100%** | **8.524.000** | **Kegiatan Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah** | | **Persentase Realisasi Pendapatan Daerah Kewenangan PD ('%)** | **DISDAGKOPRINUM** | **100%** | **8.524.000** | |  |
|  | | **-** | | Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah | | Jumlah laporan pengelolaan retribusi daerah |  | 1 dokumen | 8.524.000 | **-** | Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah | Jumlah laporan pengelolaan retribusi daerah |  | 1 dokumen | 8.524.000 | |  |
| **5** | | **Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah** | | | | **Persentase Rara-rata Capaian kinerja Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah ('%)** | **DISDAGKOPRINUM** | **100%** | **149.431.000** | **Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah** | | **Persentase Rara-rata Capaian kinerja Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah ('%)** | **DISDAGKOPRINUM** | **100%** | **149.431.000** | |  |
|  | | **-** | | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya | | Jumlah paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya |  | 40 paket | 32.150.000 | **-** | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya | Jumlah paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya |  | 40 paket | 32.150.000 | |  |
|  | | **-** | | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | | Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan |  | 4 orang | 31.025.000 | **-** | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan |  | 4 orang | 31.025.000 | |  |
|  | | **-** | | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan | | Jumlah orang yang mengikuti bimbingan teknis implementasi peraturan perundang - undangan |  | 5 orang | 72.761.000 | **-** | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan | Jumlah orang yang mengikuti bimbingan teknis implementasi peraturan perundang - undangan |  | 5 orang | 72.761.000 | |  |
|  | | **-** | | Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian | | Jumlah dokumen pendataan dan pengelolaan administrasi kepegawaian |  | 12 dokumen | 13.495.000 | **-** | Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian | Jumlah dokumen pendataan dan pengelolaan administrasi kepegawaian |  | 12 dokumen | 13.495.000 | |  |
| **6** | | **Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah** | | | | **Persentase Rata- Rata Capaian Kinerja administrasi umum PD ('%)** | **DISDAGKOPRINUM** | **100%** | **385.911.120** | **Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah** | | **Persentase Rata- Rata Capaian Kinerja administrasi umum PD ('%)** | **DISDAGKOPRINUM** | **100%** | **585.911.120** | |  |
|  | | **-** | | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | | Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang- undangan |  | 60 dokumen | 7,920,000 | **-** | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang- undangan |  | 60 dokumen | 7,920,000 | |  |
|  | | **-** | | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan |  | 4 paket | 750.000 | **-** | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan |  | 4 paket | 750.000 | |  |
|  | | **-** | | Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | | Jumlah dokumen penatausahaan arsip dinamis pada SKPD |  | 50 dokumen | 26.000.000 | **-** | Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | Jumlah dokumen penatausahaan arsip dinamis pada SKPD |  | 50 dokumen | 26.000.000 | |  |
|  | | **-** | | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | Jumlah paket Barang cetakan dan penggandaan yang disediakan |  | 3 paket | 7.653.200 | **-** | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Jumlah paket Barang cetakan dan penggandaan yang disediakan |  | 3 paket | 7.653.200 | |  |
|  | | **-** | | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/  Penerangan Bangunan Kantor | | Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang di sediakan |  | 11 paket | 2.678.000 | **-** | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/  Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang di sediakan |  | 11 paket | 2.678.000 | |  |
|  | | **-** | | Penyelenggara an Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD |  | 240 laporan | 328.168.400 | **-** | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD |  | 240 laporan | 528.168.400 | |  |
|  | | **-** | | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | | Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan |  | 20 paket | 4.523.520 | **-** | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan |  | 20 paket | 4.523.520 | |  |
|  | |  | | Fasilitasi Kunjungan Tamu | | Jumlah laporan fasilitasi kunjungan Tamu |  | 4 laporan | 8.200.000 |  | Fasilitasi Kunjungan Tamu | Jumlah laporan fasilitasi kunjungan Tamu |  | 4 laporan | 8.200.000 | |  |
| **7** | | **Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah** | | | | **Persentase BMD-PD penunjang yang terpenuhi ('%)** | **DISDAGKOPRINUM** | **100%** | **68.500.000** | **Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah** | | **Persentase BMD-PD penunjang yang terpenuhi ('%)** | **DISDAGKOPRINUM** | **100%** | **122.500.000** | |  |
|  | | **-** | | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan |  | 4 unit | 38.500.000 | **-** | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan |  | 6 unit | 62.500.000 | |  |
|  | | **-** | | Pengadaan kendaraan dinas perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan | | Jumlah unit kendaraan perorangan dinas atau dinas jabatan yang disediakan |  | 1 unit |  | **-** | Pengadaan kendaraan dinas perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan | Jumlah unit kendaraan perorangan dinas atau dinas jabatan yang disediakan |  | 1 unit | 30.000.000 | |  |
|  | | **-** | | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | Jumlah unit sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan |  | 2 unit | 18.000.000 | **-** | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah unit sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan |  | 2 unit | 18.000.000 | |  |
|  | | **-** | | Pengadaan Mebel | | Jumlah paket mebel yang disediakan |  | 2 unit | 12.000.000 | **-** | Pengadaan Mebel | Jumlah paket mebel yang disediakan |  | 5 unit | 12.000.000 | |  |
| **8** | | **Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | | | | **Persentase Rata-Rata Capaian Kiner jasa penunjang urusan pemerintahan daerah ('%)** | **DISDAGKOPRINUM** | **100%** | **137.921.500** | **Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | | **Persentase Rata-Rata Capaian Kiner jasa penunjang urusan pemerintahan daerah ('%)** | **DISDAGKOPRINUM** | **100%** | **137.921.500** | |  |
|  | | **-** | | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | Jumlahlaporam penyediaan surat menyurat |  | 1500 laporan | 7.721.500 | **-** | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlahlaporam penyediaan surat menyurat |  | 1500 laporan | 7.721.500 | |  |
|  | | **-** | | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan |  | 4 laporan | 74.400.000 | **-** | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan |  | 4 laporan | 74.400.000 | |  |
|  | | **-** | | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan |  | 4 laporan | 74.400.000 | **-** | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan |  | 4 laporan | 74,400,000 | |  |
| **9** | |  | | **Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | | **Persentase Barang Milik Daerah penunjang urusan pemerintahan yang terpelihara dengan baik ('%)** | **DISDAGKOP-UKM** | **100%** | **106.520.000** |  | **Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **Persentase Barang Milik Daerah penunjang urusan pemerintahan yang terpelihara dengan baik ('%)** | **DISDAGKOP-UKM** | **100%** | **116.520.000** | |  |
|  | | - | | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizina Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | Jumlah kendaraan dinas operasional yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya dan perizinannya |  | 10 unit | 58,700,000 | - | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah kendaraan dinas operasional yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya dan perizinannya |  | 10 unit | 58,700,000 | |  |
|  | |  | | Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | Jumlah gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi |  | 1 unit | 30,000,000 |  | Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi |  | 1 unit | 30,000,000 | |  |
|  | |  | | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara |  | 54 unit | 27.820.000 |  | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara (Unit) |  | 45 unit | 27.820.000 | |  |
| **II** | | **PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN** | | | | **Pertumbuhan omzet pedagang pasar rakyat yang telah dibangun/ direvitalisasi (%)** | **Kab. Luwu Timur** | 10% | 21.677.134.400 | **PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN** | | **Pertumbuhan omzet pedagang pasar rakyat yang telah dibangun/ direvitalisasi (%)** | **Kab. Luwu Timur** | 10% | 21.677.134.400 | |  |
| **10** | | **Kegiatan Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan** | | | | **Jumlah pasar/sarana prasarana distribusi perdagangan yang termanfaatkan (Pasar)** | **Kab. Luwu Timur** | **5 pasar** | **21.335.420.000** | **Kegiatan Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan** | | **Jumlah pasar/sarana prasarana distribusi perdagangan yang termanfaatkan (Pasar)** |  | **1 pasar** | **21.335.420.000** | |  |
|  | | **-** | | Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan | | Jumlah sarana distribusi perdagangan |  | 5 unit | 21.335.420.000 | **-** | Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan | Jumlah sarana distribusi perdagangan |  | 4 unit | 21.335.420.000 | |  |
| **11** | | **Kegiatan Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya** | | | | **Persentase peningkatan kapasitas pengelola sarana distribusi perdagangan ('%)** | **Kab. Luwu Timur** | **70%** | **341.714.400** | **Kegiatan Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya** | | **Persentase peningkatan kapasitas pengelola sarana distribusi perdagangan ('%)** |  | **70%** | **341.714.400** | |  |
|  | | **-** | | Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan | | Jumlah dokumen hasil pembinaan dan pengendalian kepada pengelolah sarana distribusi perdagangan |  | 1 dokumen | 341.714.400 | **-** | Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan | Jumlah dokumen hasil pembinaan dan pengendalian kepada pengelolah sarana distribusi perdagangan) |  | 1 dokumen | 341.714.400 | |  |
| **III** | | **PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING** | | | | **Persentase stabilitasi dan jumlah ketersediaan harga barang kebutuhan pokok ('%)** | **Kab. Luwu Timur** | **7,50%** | **512.823.156** | **PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING** | | **Persentase stabilitasi dan jumlah ketersediaan harga barang kebutuhan pokok ('%)** | **Kab. Luwu Timur** | **7,50%** | **512.823.156** | |  |
| 12 | | **Kegiatan Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota** | | | | **Persentase harga barang kebutuhan pokok dan barang penting yang terkendali (%)** | **Kab. Luwu Timur** | **44%** | **485.933.600** | **Kegiatan Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota** | | **Persentase harga barang kebutuhan pokok dan barang penting yang terkendali (%)** | **Kab. Luwu Timur** | **44%** | **485.933.600** | |  |
|  | | **-** | | Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan | | Jumlah laporan pemantauan harga dan stok barang kebutuhan pokok dan barang penting pada pasar rakyat yang terintegrasi dalam sistem informasi perdagangan |  | 12 laporan | 85.485.200 | **-** | Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan | Jumlah laporan pemantauan harga dan stok barang kebutuhan pokok dan barang penting pada pasar rakyat yang terintegrasi dalam sistem informasi perdagangan |  | 12 laporan | 85.485.200 | |  |
|  | | **-** | | Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota | | Jumlah laporan pelaksanaan operasi pasar reguler dan pasar khusus yang berdampak dalam 1 (satu) kabupaten/kota |  | 11 laporan | 400.448.400 | **-** | Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (satu) Kabupaten/ Kota | Jumlah laporan pelaksanaan operasi pasar reguler dan pasar khusus yang berdampak dalam 1 (satu) kabupaten/kota |  | 11 laporan | 400.448.400 | |  |
| 13 | | **Kegiatan Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota** | | | | **Persentase kinerja pengawasan penyakuran pupuk bersubsidi dan pestisida ('%)** | **Kab. Luwu Timur** | **100%** | **26.889.556** | **Kegiatan Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota** | | **Persentase kinerja pengawasan penyakuran pupuk bersubsidi dan pestisida ('%)** |  | **100%** | **26.889.556** | |  |
|  | | **-** | | Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi | | Jumlah laporan pengawasan penyaluran dan penggunaan pupuk dan pestisida bersubsidi minimal 90% |  | 60 laporan | 26.889.556 | **-** | Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi | Jumlah laporan pengawasan penyaluran dan penggunaan pupuk dan pestisida bersubsidi minimal 90% |  | 60 laporan | 26.889.556 | |  |
| **IV** | | **PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR** | | | | **Persentase peningkatan nilai ekspor (%)** | **Kab. Luwu Timur** | 15% | 304.431.443 | **PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR** | | **Persentase peningkatan nilai ekspor (%)** | **Kab. Luwu Timur** | 15% | 304.431.443 | |  |
| **14** | | **Kegiatan Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota** | | | | **Persentase produk yang memperoleh fasilitas promosi dagang ('%)** |  | **40%** | **304.431.443** | **Kegiatan Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota** | | **Persentase produk yang memperoleh fasilitas promosi dagang ('%)** |  | **40%** | **304.431.443** | |  |
|  | | **-** | | Pemeran Dagang Nasional | | Jumlah pelaku usaha yang difasilitasi dalam pameran dagang nasional |  | 5 pelaku usaha | 170.809.918 | **-** | Pemeran Dagang Nasional | Jumlah pelaku usaha yang difasilitasi dalam pameran dagang nasional |  | 5 pelaku usaha | 170.809.918 | |  |
|  | | **-** | | Pemeran Dagang Lokal | | Jumlah pelaku usaha yang difasilitasi dalam pameran dagang lokal |  | 5 pelaku usaha | 35.930.000 | **-** | Pemeran Dagang Lokal | Jumlah pelaku usaha yang difasilitasi dalam pameran dagang lokal |  | 5 pelaku usaha | 35.930.000 | |  |
|  | | **-** | | Misi Dagang Bagi Produk Ekspor Unggulan | | Jumlah pelaku usaha yang difasilitasi dalam misi dagang produk ekspor unggulan |  | 5 pelaku usaha | 79.465.000 | **-** | Misi Dagang Bagi Produk Ekspor Unggulan | Jumlah pelaku usaha yang difasilitasi dalam misi dagang produk ekspor unggulan |  | 5 pelaku usaha | 79.465.000 | |  |
|  | | **-** | | Peningkatan Citra Produk Ekspor | | Jumlah produk unggulan ekspor daerah yang disusun menjadi materi promosi |  | 5 produk | 18.226.525 | **-** | Peningkatan Citra Produk Ekspor | Jumlah produk unggulan ekspor daerah yang disusun menjadi materi promosi |  | 5 produk | 18.226.525 | |  |
| **V** | | **PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN** | | | | **Persentase penurunan pengaduan konsumen tentang alat UTTP (%)** | **Kab. Luwu Timur** | 5% | 157.366.100 | **PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN** | | **Persentase penurunan pengaduan konsumen tentang alat UTTP (%)** | **Kab. Luwu Timur** | 5% | 157.336.100 | |  |
| **15** | | **Kegiatan Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan** | | | | **Persentase alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya yang diawasi (%)** |  | **70%** | **157.366.100** | **Kegiatan Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan** | | **Persentase alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya yang diawasi (%)** |  | **70%** | **157.336.100** | |  |
|  | | **-** | | Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang | | Jumlah alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) yang ditera/tera ulang |  | 975 unit | 157.366.100 | **-** | Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang | Jumlah alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) yang ditera/tera ulang |  | 975 unit | 157.336.100 | |  |
| **VI** | | **PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM** | | | | **Persentase peningkatan jumlah koperasi yang memiliki izin usaha simpan pinjam (%)** | **Kab. Luwu Timur** | 14,72% | 27.668.500 | **PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM** | | **Persentase peningkatan jumlah koperasi yang memiliki izin usaha simpan pinjam (%)** | **Kab. Luwu Timur** | 14,72% | 27.668.500 | |  |
| **16** | | **Kegiatan Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota** | | | | **Persentase fasilitasi penerbitan izin pembukaan kantor cabang, cabang pembantu dan kantor kas koperasi ('%)** |  | **13,41%** | **37.668.500** | **Kegiatan Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota** | | **Persentase fasilitasi penerbitan izin pembukaan kantor cabang, cabang pembantu dan kantor kas koperasi ('%)** |  | **13,41%** | **27.668.500** | |  |
|  | | **-** | | Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota | | Jumlah usaha simpan pinjam dan pembukaan kantor cabang, cabang pembantu dan kantor kas koperasi simpan pinjam untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah |  | 59 unit usaha | 27.668.500 | **-** | Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/ Kota | Jumlah usaha simpan pinjam dan pembukaan kantor cabang, cabang pembantu dan kantor kas koperasi simpan pinjam untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah |  | 59 unit usaha | 27.668.500 | |  |
| **VII** | | **PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI** | | | | **Persentase koperasi yang berkualitas ('%)** | **Kab. Luwu Timur** | 36,13% | 374.691.600 | **PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI** | | **Persentase koperasi yang berkualitas ('%)** | **Kab. Luwu Timur** | 36,13% | 374.691.600 | |  |
| **17** | | **Kegiatan Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota** | | | | **Persentase pemeriksaan dan pengawasan yang dilakukan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan lintas daerah kabupaten/kota ('%)** |  | 90,20% | 374.691.600 | **Kegiatan Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota** | | **Persentase pemeriksaan dan pengawasan yang dilakukan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan lintas daerah kabupaten/ kota ('%)** |  | 90,20% | 374.691.600 | |  |
|  | | **-** | | Pelaksanaan Proses Pemeriksaan Pengawasan Koperasi yang wilyah Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota | | Jumlah koperasi yang dilakukan pemeriksaan dan pengawasan |  | 166 unit usaha | 374.691.600 | **-** | Pelaksanaan Proses Pemeriksaan Pengawasan Koperasi yang wilyah Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah koperasi yang dilakukan pemeriksaan dan pengawasan |  | 166 unit usaha | 374.691.600 | |  |
| **VIII** | | **PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI** | | | | **Persentase koperasi sehat ('%)** | **Kab. Luwu Timur** | 35,75% | 79.093.100 | **PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI** | | **Persentase koperasi sehat ('%)** | **Kab. Luwu Timur** | 35,75% | 79.093.100 | |  |
| **18** | | **Kegiatan Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaanya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota** | | | | **Persentase usaha simpan pinjam koperasi yang dinilai kesehatannya** |  | **55,81%** | **79.093.100** | **Kegiatan Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaanya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota** | | **Persentase usaha simpan pinjam koperasi yang dinilai kesehatannya** |  | **55,81%** | **79.093.100** | |  |
|  | | **-** | | Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota | | Jumlah unit usaha koperasi yang telah dilakukan penilaian kesehatan |  | 15 unit usaha | 79.093.100 | **-** | Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota | Jumlah unit usaha koperasi yang telah dilakukan penilaian kesehatan |  | 15 unit usaha | 79.093.100 | |  |
| **IX** | |  | | **PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN** | | **Persentase koperasi yang meningkat manajemen pengelolaan melalui pendidikan dan pelatihan ('%)** | **Kab. Luwu Timur** | 15,61% | 216.065.500 |  | **PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN** | **Persentase koperasi yang meningkat manajemen pengelolaan melalui pendidikan dan pelatihan ('%)** | **Kab. Luwu Timur** | 15,61% | 216.065.500 | |  |
| **19** | | **Kegiatan Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota** | | | | **Persentase koperasi yang mengikuti pelatihan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan lintas daerah kabupaten/kota ('%)** |  | 40,93% | 216.065.500 | **Kegiatan Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota** | | **Persentase koperasi yang mengikuti pelatihan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan lintas daerah kabupaten/ kota ('%)** |  | 40,93% | 216.065.500 | |  |
|  | | **-** | | Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi | | Jumlah SDM yang memahami pengetahuan perkoperasian |  | 15 orang | 216.065.500 | **-** | Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi | Jumlah SDM yang memahami pengetahuan perkoperasian |  | 15 orang | 216.065.500 | |  |
| **X** | | **PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI** | | | | **Persentase peningkatan produktifitas, nilai tambah, akses pasar, akses pembiayaan, penguatan kelembagaan koperasi** | **Kab. Luwu Timur** | 6,75% | 37.323.500 | **PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI** | | **Persentase peningkatan produktifitas, nilai tambah, akses pasar, akses pembiayaan, penguatan kelembagaan koperasi** | **Kab. Luwu Timur** | 6,75% | 37.323.500 | |  |
| **20** | | **Kegiatan Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota** | | | | **Persentase pemberdayaan peningkatan produktifitas, nilai tambah, akses pasar, akses pembiayaan, penguatan kelembagaan, penataan manajemen, standarisasi dan restrukturisasi usaha** |  | 6,75% | 37.323.500 | **Kegiatan Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota** | | **Persentase pemberdayaan peningkatan produktifitas, nilai tambah, akses pasar, akses pembiayaan, penguatan kelembagaan, penataan manajemen, standarisasi dan restrukturisasi usaha** |  | 6,75% | 37.323.500 | |  |
|  | | **-** | | Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota | | Jumlah unit usaha yang produktif, bernilai tambah, memiliki akses pasar, akses pembiayaan, penguatan kelembagaan, penataan manajemen, standarisasi dan restrukturisasi usaha koperasi |  | 20 unit usaha | 37.323.500 | **-** | Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota | Jumlah unit usaha yang produktif, bernilai tambah, memiliki akses pasar, akses pembiayaan, penguatan kelembagaan, penataan manajemen, standarisasi dan restrukturisasi usaha koperasi |  | 20 unit usaha | 37.323.500 | |  |
| **XI** | | **PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)** | | | | **Persentase usaha mikro yang menjadi wirausaha ('%)** | **Kab. Luwu Timur** | 55% | 580.404.000 | **PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)** | | **Persentase usaha mikro yang menjadi wirausaha ('%)** | **Kab. Luwu Timur** | 55% | 580.404.000 | |  |
| **21** | | **Kegiatan Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan** | | | | **Jumlah wirausaha baru berskala mikro (WUB)** |  | 145 WUB | 580.404.000 | **Kegiatan Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan** | | **Jumlah wirausaha baru berskala mikro (WUB)** |  | 145 WUB | 580.404.000 | |  |
|  | | **-** | | Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro | | Jumlah SDM yang telah melakukan koordinasi dan sinkronisasi dengan para pemangku kepentingan dalam pemberdayaan usaha mikro |  | 100 orang | 46.225.000 | **-** | Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro | Jumlah SDM yang telah melakukan koordinasi dan sinkronisasi dengan para pemangku kepentingan dalam pemberdayaan usaha mikro |  | 100 orang | 46.225.000 | |  |
|  | | **-** | | Pemberdayaan melalui Kemitraan Usaha Mikro | | Jumlah unit usaha yang telah melaksanakan kemitraan usaha mikro |  | 70 unit usaha | 24.577.000 | **-** | Pemberdayaan melalui Kemitraan Usaha Mikro | Jumlah unit usaha yang telah melaksanakan kemitraan usaha mikro |  | 70 unit usaha | 24.577.000 | |  |
|  | | **-** | | Penyusunan Basis Data Usaha Mikro | | Jumlah unit usaha yang terdata |  | 270 unit usaha | 64.222.000 | **-** | Penyusunan Basis Data Usaha Mikro | Jumlah unit usaha yang terdata |  | 270 unit usaha | 64.222.000 | |  |
|  | | **-** | | Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro | | Jumlah unit usaha yang telah menerima pembinaan dan pendampingan terhadap usaha mikro |  | 95 unit usaha | 405.502.000 | **-** | Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro | Jumlah unit usaha yang telah menerima pembinaan dan pendampingan terhadap usaha mikro |  | 95 unit usaha | 405.502.000 | |  |
|  | | **-** | | Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro | | Jumlah usaha mikro yang telah mendapatkan perizinan |  | 40 usaha usaha | 39.878.000 | **-** | Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro | Jumlah usaha mikro yang telah mendapatkan perizinan |  | 40 usaha usaha | 39.878.000 | |  |
| **XII** | | **PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM** | | | | **Rasio pertumbuhan skala usaha mikro ('%)** | **Kab. Luwu Timur** | 6,36% | 308.901.000 | **PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM** | | **Rasio pertumbuhan skala usaha mikro ('%)** | **Kab. Luwu Timur** | 6,36% | 458.901.000 | |  |
| **22** | | **Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil** | | | | Persentase peningkatan skala usaha mikro (%) |  | 8,30% | 308.901.000 | **Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil** | | Persentase peningkatan skala usaha mikro (%) |  | 8,30% | 458.901.000 | |  |
|  | | **-** | | Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi | | Jumlah unit usaha UMKM yang mendapatkan fasilitas produksi dan pengolahan, pemasaran SDM serta Desain dan teknologi |  | 19 unit usaha | 308.901.000 | **-** | Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi | Jumlah unit usaha UMKM yang mendapatkan fasilitas produksi dan pengolahan, pemasaran SDM serta Desain dan teknologi |  | 19 unit usaha | 458.901.000 | |  |
| **XIII** | | **PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI** | | | | **Jumlah peraturan Bupati (perbub) yang ditetapkan** | **Kab. Luwu Timur** | 0 dokumen | 909.325.800 | **PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI** | | **Jumlah peraturan Bupati (perbub) yang ditetapkan** | **Kab. Luwu Timur** | 0 dokumen | 909.325.800 | |  |
| **23** | | **Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota** | | | | **Jumlah dokumen revisi siteplan dan amdal kawasan industri yang dievaluasi** |  | 0 dokumen | 909.325.000 | **Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota** | | **Jumlah dokumen revisi siteplan dan amdal kawasan industri yang dievaluasi** |  | 0 dokumen | 909.325.000 | |  |
|  | | **-** | | Koordinasi dan Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri | | Jumlah dokumen hasil koordinasi dan sinkronisasi, dan pelaksanaan pembangunan sumber daya industri |  | 1 dokumen | 457.714.300 | **-** | Koordinasi dan Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri | Jumlah dokumen hasil koordinasi dan sinkronisasi, dan pelaksanaan pembangunan sumber daya industri |  | 1 dokumen | 457.714.300 | |  |
|  | | **-** | | Koordinasi dan Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Industri dan Peran Serta Masyarakat | | Jumlah dokumen hasil koordinasi dan sinkronisasi, dan pelaksanaan pembangunan industri serta peran masyarakat |  | 1 dokumen | 61.611.500 | **-** | Koordinasi dan Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Industri dan Peran Serta Masyarakat | Jumlah dokumen hasil koordinasi dan sinkronisasi, dan pelaksanaan pembangunan industri serta peran masyarakat |  | 1 dokumen | 61.611.500 | |  |
|  | | **-** | | Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri | | Jumlah Dokumen evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan industri |  | 1 dokumen | 390.000.000 | **-** | Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri | Jumlah Dokumen evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan industri |  | 1 dokumen | 390.000.000 | |  |
| **XIV** | | **PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI** | | | | **Persentase izin usaha industri kecil dan menengah yang terkendali** | **Kab. Luwu Timur** | 92,30% | 39.640.000 | **PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI** | | **Persentase izin usaha industri kecil dan menengah yang terkendali** | **Kab. Luwu Timur** | 92,30% | 39.640.000 | |  |
| **24** | | **Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota** | | | | **Persentase Izin usaha industri kecil dan menengah yang terkendali** |  | 59,09% | 39.640.000 | **Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota** | | **Persentase Izin usaha industri kecil dan menengah yang terkendali** |  | 59,09% | 39.640.000 | |  |
|  | | **-** | | Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan di Bidang Industri dalam lingkup IUI, IPUI, IUKI, dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota | | Jumlah dokumen hasil koordinasi dan sinkronisasi pengawasan perizinan dibidang industri dalam lingkup IUI, IPUI, IUKI, dan IPKI kewenangan Kabupaten/Kota |  | 1 dokumen | 39.640.000 | **-** | Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan di Bidang Industri dalam lingkup IUI, IPUI, IUKI, dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota | Jumlah dokumen hasil koordinasi dan sinkronisasi pengawasan perizinan dibidang industri dalam lingkup IUI, IPUI, IUKI, dan IPKI kewenangan Kabupaten/Kota |  | 1 dokumen | 39.640.000 | |  |
| **XV** | |  | | **PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL** | | **Persentase pengelolaan data usaha industri ke sistem informasi industri nasional yang terkelolah sesuai standar** | **Kab. Luwu Timur** | **15%** | **96.455.000** |  | **PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL** | **Persentase pengelolaan data usaha industri ke sistem informasi industri nasional yang terkelolah sesuai standar** | **Kab. Luwu Timur** | **15%** | **96.455.000** | |  |
| **25** | |  | | **Penyediaan Informasi Industri Untuk Informasi Industri Untuk IUI, IPUI, IUKI, dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota** | | **Persentase usaha industri yang terkelolah dalam sistem informasi industri nasional (SIINas)** |  | **56,25%** | **96.455.000** |  | **Penyediaan Informasi Industri Untuk Informasi Industri Untuk IUI, IPUI, IUKI, dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota** | **Persentase usaha industri yang terkelolah dalam sistem informasi industri nasional (SIINas)** |  | **56,25%** | **96.455.000** | |  |
|  | | - | | Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Kabupaten/Kota dalam Penyampaian Data Ke SIINas | | Jumlah Dokumen hasil pemantauan dan Evaluasi kepatuhan perusahaan industri dan perusahaan kawasan industri lingkup kabupaten/kota dalam penyampaian data ke SIINas |  | 1 dokumen | 35.000.000 | - | Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Kabupaten/Kota dalam Penyampaian Data Ke SIINas | Jumlah Dokumen hasil pemantauan dan Evaluasi kepatuhan perusahaan industri dan perusahaan kawasan industri lingkup kabupaten/kota dalam penyampaian data ke SIINas |  | 1 dokumen | 35.000.000 | |  |
|  | | - | | Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan analisis data industri, data Kawasan Industri Serta data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) | | Jumlah Dokumen hasil fiasilitasi pengumpulan, Pengolahan dan analisis data industri, data kawasan industri serta data lain lingkup kabupaten/kota melalui sistem informasi industri nasional (SIINas) |  | 1 dokumen | 61.455.000 | - | Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan analisis data industri, data Kawasan Industri Serta data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) | Jumlah Dokumen hasil fiasilitasi pengumpulan, Pengolahan dan analisis data industri, data kawasan industri serta data lain lingkup kabupaten/kota melalui sistem informasi industri nasional (SIINas) |  | 1 dokumen | 61.455.000 | |  |
| **JUMLAH TOTAL** | | | | | | | | | **30.140.567.596** | **JUMLAH TOTAL** | | | | | **30.594.567.596** | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Hasil Analisis Kebutuhan** | | | | | | **Catatan Penting** |
| **Program/ Kegiatan/**  **Sub Kegiatan** | | **Indikator Kinerja** | **Lokasi** | **Target Capaian Kinerja** | **Kebutuhan Dana** |
| **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA** | | **Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar** |  | 100% | 5.123.244.497 |  |
| **Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah** | | **Persentase penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran & evaluasi tepat waktu ('%)** | **DISDAGKOPRINUM** | **100%** | **136.951.800** |  |
| **-** | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah |  | 10 laporan | 33.881.300 |  |
| **-** | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | Jumlah dokumen RKA- SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen RKA-SKPD |  | 2 dokumen | 3.112.300 |  |
|  | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah dokumen Perangkat daerah |  | 3 dokumen | 95.928.200 |  |
| **-** | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | Jumlah dokumen DPA- dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen DPA-SKPD |  | 2 dokumen | 3.110.000 |  |
| **Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** | | **Persentase administrasi keuangan yang terselenggara dengan baik** | **DISDAGKOPRINUM** | **100%** | **3.830.880.077** |  |
| **-** | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD | Jumlah laporan keuangan bulanan/ triwulanan/ semesteran SKPD dan laporan koordinasi penyusunan laporang keuangan bulanan/triwulan/semesteran SKPD |  | 18 laporan | 115.521.800 |  |
| **-** | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN |  | 28 orang/bulan | 3.715.358.277 |  |
| **Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah** | | **Persentase BMD yang Diadministrasikan sesuai standar ('%)** | **DISDAGKOP-UKM** | **100%** | **35.525.000** |  |
| **-** | Penatausaha an Barang Milik Daerah pada SKPD | Jumlah laporan penatausahaan barang milik daerah pada SKPD |  | 2 dokumen | 35.525.000 |  |
| **Kegiatan Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah** | | **Persentase Realisasi Pendapatan Daerah Kewenangan PD ('%)** | **DISDAGKOPRINUM** | **100%** | **8.524.000** |  |
| **-** | Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah | Jumlah laporan pengelolaan retribusi daerah |  | 1 dokumen | 8.524.000 |  |
| **Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah** | | **Persentase Rara-rata Capaian kinerja Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah ('%)** | **DISDAGKOPRINUM** | **100%** | **149.431.000** |  |
| **-** | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya | Jumlah paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya |  | 40 paket | 32.150.000 |  |
| **-** | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan |  | 4 orang | 31.025.000 |  |
| **-** | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan | Jumlah orang yang mengikuti bimbingan teknis implementasi peraturan perundang - undangan |  | 5 orang | 72.761.000 |  |
| **-** | Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian | Jumlah dokumen pendataan dan pengelolaan administrasi kepegawaian |  | 12 dokumen | 13.495.000 |  |
| **Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah** | | **Persentase Rata- Rata Capaian Kinerja administrasi umum PD ('%)** | **DISDAGKOPRINUM** | **100%** | **585.911.120** |  |
| **-** | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang- undangan |  | 60 dokumen | 7,920,000 |  |
| **-** | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan |  | 4 paket | 750.000 |  |
| **-** | Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | Jumlah dokumen penatausahaan arsip dinamis pada SKPD |  | 50 dokumen | 26.000.000 |  |
| **-** | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Jumlah paket Barang cetakan dan penggandaan yang disediakan |  | 3 paket | 7.653.200 |  |
| **-** | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/  Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang di sediakan |  | 11 paket | 2.678.000 |  |
| **-** | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD |  | 240 laporan | 528.168.400 |  |
| **-** | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan |  | 20 paket | 4.523.520 |  |
|  | Fasilitasi Kunjungan Tamu | Jumlah laporan fasilitasi kunjungan Tamu |  | 4 laporan | 8.200.000 |  |
| **Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah** | | **Persentase BMD-PD penunjang yang terpenuhi ('%)** | **DISDAGKOPRINUM** | **100%** | **122.500.000** |  |
| **-** | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan |  | 6 unit | 62.500.000 |  |
| **-** | Pengadaan kendaraan dinas perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan | Jumlah unit kendaraan perorangan dinas atau dinas jabatan yang disediakan |  | 1 unit | 30.000.000 |  |
| **-** | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah unit sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan |  | 2 unit | 18.000.000 |  |
| **-** | Pengadaan Mebel | Jumlah paket mebel yang disediakan |  | 5 unit | 12.000.000 |  |
| **Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | | **Persentase Rata-Rata Capaian Kiner jasa penunjang urusan pemerintahan daerah ('%)** | **DISDAGKOPRINUM** | **100%** | **137.921.500** |  |
| **-** | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlahlaporam penyediaan surat menyurat |  | 1500 laporan | 7.721.500 |  |
| **-** | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan |  | 4 laporan | 74.400.000 |  |
| **-** | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan |  | 4 laporan | 74,400,000 |  |
|  | **Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **Persentase Barang Milik Daerah penunjang urusan pemerintahan yang terpelihara dengan baik ('%)** | **DISDAGKOP-UKM** | **100%** | **116.520.000** |  |
| - | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah kendaraan dinas operasional yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya dan perizinannya |  | 10 unit | 58,700,000 |  |
|  | Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi |  | 1 unit | 30,000,000 |  |
|  | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara (Unit) |  | 45 unit | 27.820.000 |  |
| **PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN** | | **Pertumbuhan omzet pedagang pasar rakyat yang telah dibangun/ direvitalisasi (%)** | **Kab. Luwu Timur** | 10% | 21.677.134.400 |  |
| **Kegiatan Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan** | | **Jumlah pasar/sarana prasarana distribusi perdagangan yang termanfaatkan (Pasar)** |  | **1 pasar** | **21.335.420.000** |  |
| **-** | Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan | Jumlah sarana distribusi perdagangan |  | 4 unit | 21.335.420.000 |  |
| **Kegiatan Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya** | | **Persentase peningkatan kapasitas pengelola sarana distribusi perdagangan ('%)** |  | **70%** | **341.714.400** |  |
| **-** | Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan | Jumlah dokumen hasil pembinaan dan pengendalian kepada pengelolah sarana distribusi perdagangan) |  | 1 dokumen | 341.714.400 |  |
| **PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING** | | **Persentase stabilitasi dan jumlah ketersediaan harga barang kebutuhan pokok ('%)** | **Kab. Luwu Timur** | **7,50%** | **512.823.156** |  |
| **Kegiatan Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota** | | **Persentase harga barang kebutuhan pokok dan barang penting yang terkendali (%)** | **Kab. Luwu Timur** | **44%** | **485.933.600** |  |
| **-** | Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan | Jumlah laporan pemantauan harga dan stok barang kebutuhan pokok dan barang penting pada pasar rakyat yang terintegrasi dalam sistem informasi perdagangan |  | 12 laporan | 85.485.200 |  |
| **-** | Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (satu) Kabupaten/ Kota | Jumlah laporan pelaksanaan operasi pasar reguler dan pasar khusus yang berdampak dalam 1 (satu) kabupaten/kota |  | 11 laporan | 400.448.400 |  |
| **Kegiatan Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota** | | **Persentase kinerja pengawasan penyakuran pupuk bersubsidi dan pestisida ('%)** |  | **100%** | **26.889.556** |  |
| **-** | Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi | Jumlah laporan pengawasan penyaluran dan penggunaan pupuk dan pestisida bersubsidi minimal 90% |  | 60 laporan | 26.889.556 |  |
| **PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR** | | **Persentase peningkatan nilai ekspor (%)** | **Kab. Luwu Timur** | 15% | 304.431.443 |  |
| **Kegiatan Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota** | | **Persentase produk yang memperoleh fasilitas promosi dagang ('%)** |  | **40%** | **304.431.443** |  |
| **-** | Pemeran Dagang Nasional | Jumlah pelaku usaha yang difasilitasi dalam pameran dagang nasional |  | 5 pelaku usaha | 170.809.918 |  |
| **-** | Pemeran Dagang Lokal | Jumlah pelaku usaha yang difasilitasi dalam pameran dagang lokal |  | 5 pelaku usaha | 35.930.000 |  |
| **-** | Misi Dagang Bagi Produk Ekspor Unggulan | Jumlah pelaku usaha yang difasilitasi dalam misi dagang produk ekspor unggulan |  | 5 pelaku usaha | 79.465.000 |  |
| **-** | Peningkatan Citra Produk Ekspor | Jumlah produk unggulan ekspor daerah yang disusun menjadi materi promosi |  | 5 produk | 18.226.525 |  |
| **PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN** | | **Persentase penurunan pengaduan konsumen tentang alat UTTP (%)** | **Kab. Luwu Timur** | 5% | 157.336.100 |  |
| **Kegiatan Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan** | | **Persentase alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya yang diawasi (%)** |  | **70%** | **157.336.100** |  |
| **-** | Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang | Jumlah alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) yang ditera/tera ulang |  | 975 unit | 157.336.100 |  |
| **PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM** | | **Persentase peningkatan jumlah koperasi yang memiliki izin usaha simpan pinjam (%)** | **Kab. Luwu Timur** | 14,72% | 27.668.500 |  |
| **Kegiatan Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota** | | **Persentase fasilitasi penerbitan izin pembukaan kantor cabang, cabang pembantu dan kantor kas koperasi ('%)** |  | **13,41%** | **27.668.500** |  |
| **-** | Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/ Kota | Jumlah usaha simpan pinjam dan pembukaan kantor cabang, cabang pembantu dan kantor kas koperasi simpan pinjam untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah |  | 59 unit usaha | 27.668.500 |  |
| **PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI** | | **Persentase koperasi yang berkualitas ('%)** | **Kab. Luwu Timur** | 36,13% | 374.691.600 |  |
| **Kegiatan Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota** | | **Persentase pemeriksaan dan pengawasan yang dilakukan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan lintas daerah kabupaten/ kota ('%)** |  | 90,20% | 374.691.600 |  |
| **-** | Pelaksanaan Proses Pemeriksaan Pengawasan Koperasi yang wilyah Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah koperasi yang dilakukan pemeriksaan dan pengawasan |  | 166 unit usaha | 374.691.600 |  |
| **PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI** | | **Persentase koperasi sehat ('%)** | **Kab. Luwu Timur** | 35,75% | 79.093.100 |  |
| **Kegiatan Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaanya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota** | | **Persentase usaha simpan pinjam koperasi yang dinilai kesehatannya** |  | **55,81%** | **79.093.100** |  |
| **-** | Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota | Jumlah unit usaha koperasi yang telah dilakukan penilaian kesehatan |  | 15 unit usaha | 79.093.100 |  |
|  | **PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN** | **Persentase koperasi yang meningkat manajemen pengelolaan melalui pendidikan dan pelatihan ('%)** | **Kab. Luwu Timur** | 15,61% | 216.065.500 |  |
| **Kegiatan Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota** | | **Persentase koperasi yang mengikuti pelatihan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan lintas daerah kabupaten/ kota ('%)** |  | 40,93% | 216.065.500 |  |
| **-** | Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi | Jumlah SDM yang memahami pengetahuan perkoperasian |  | 15 orang | 216.065.500 |  |
| **PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI** | | **Persentase peningkatan produktifitas, nilai tambah, akses pasar, akses pembiayaan, penguatan kelembagaan koperasi** | **Kab. Luwu Timur** | 6,75% | 37.323.500 |  |
| **Kegiatan Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota** | | **Persentase pemberdayaan peningkatan produktifitas, nilai tambah, akses pasar, akses pembiayaan, penguatan kelembagaan, penataan manajemen, standarisasi dan restrukturisasi usaha** |  | 6,75% | 37.323.500 |  |
| **-** | Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota | Jumlah unit usaha yang produktif, bernilai tambah, memiliki akses pasar, akses pembiayaan, penguatan kelembagaan, penataan manajemen, standarisasi dan restrukturisasi usaha koperasi |  | 20 unit usaha | 37.323.500 |  |
| **PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)** | | **Persentase usaha mikro yang menjadi wirausaha ('%)** | **Kab. Luwu Timur** | 55% | 580.404.000 |  |
| **Kegiatan Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan** | | **Jumlah wirausaha baru berskala mikro (WUB)** |  | 145 WUB | 580.404.000 |  |
| **-** | Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro | Jumlah SDM yang telah melakukan koordinasi dan sinkronisasi dengan para pemangku kepentingan dalam pemberdayaan usaha mikro |  | 100 orang | 46.225.000 |  |
| **-** | Pemberdayaan melalui Kemitraan Usaha Mikro | Jumlah unit usaha yang telah melaksanakan kemitraan usaha mikro |  | 70 unit usaha | 24.577.000 |  |
| **-** | Penyusunan Basis Data Usaha Mikro | Jumlah unit usaha yang terdata |  | 270 unit usaha | 64.222.000 |  |
| **-** | Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro | Jumlah unit usaha yang telah menerima pembinaan dan pendampingan terhadap usaha mikro |  | 95 unit usaha | 405.502.000 |  |
| **-** | Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro | Jumlah usaha mikro yang telah mendapatkan perizinan |  | 40 usaha usaha | 39.878.000 |  |
| **PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM** | | **Rasio pertumbuhan skala usaha mikro ('%)** | **Kab. Luwu Timur** | 6,36% | 458.901.000 |  |
| **Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil** | | Persentase peningkatan skala usaha mikro (%) |  | 8,30% | 458.901.000 |  |
| **-** | Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi | Jumlah unit usaha UMKM yang mendapatkan fasilitas produksi dan pengolahan, pemasaran SDM serta Desain dan teknologi |  | 19 unit usaha | 458.901.000 |  |
| **PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI** | | **Jumlah peraturan Bupati (perbub) yang ditetapkan** | **Kab. Luwu Timur** | 0 dokumen | 909.325.800 |  |
| **Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota** | | **Jumlah dokumen revisi siteplan dan amdal kawasan industri yang dievaluasi** |  | 0 dokumen | 909.325.000 |  |
| **-** | Koordinasi dan Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri | Jumlah dokumen hasil koordinasi dan sinkronisasi, dan pelaksanaan pembangunan sumber daya industri |  | 1 dokumen | 457.714.300 |  |
| **-** | Koordinasi dan Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Industri dan Peran Serta Masyarakat | Jumlah dokumen hasil koordinasi dan sinkronisasi, dan pelaksanaan pembangunan industri serta peran masyarakat |  | 1 dokumen | 61.611.500 |  |
| **-** | Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri | Jumlah Dokumen evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan industri |  | 1 dokumen | 390.000.000 |  |
| **PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI** | | **Persentase izin usaha industri kecil dan menengah yang terkendali** | **Kab. Luwu Timur** | 92,30% | 39.640.000 |  |
| **Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota** | | **Persentase Izin usaha industri kecil dan menengah yang terkendali** |  | 59,09% | 39.640.000 |  |
| **-** | Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan di Bidang Industri dalam lingkup IUI, IPUI, IUKI, dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota | Jumlah dokumen hasil koordinasi dan sinkronisasi pengawasan perizinan dibidang industri dalam lingkup IUI, IPUI, IUKI, dan IPKI kewenangan Kabupaten/Kota |  | 1 dokumen | 39.640.000 |  |
|  | **PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL** | **Persentase pengelolaan data usaha industri ke sistem informasi industri nasional yang terkelolah sesuai standar** | **Kab. Luwu Timur** | **15%** | **96.455.000** |  |
|  | **Penyediaan Informasi Industri Untuk Informasi Industri Untuk IUI, IPUI, IUKI, dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota** | **Persentase usaha industri yang terkelolah dalam sistem informasi industri nasional (SIINas)** |  | **56,25%** | **96.455.000** |  |
| - | Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Kabupaten/Kota dalam Penyampaian Data Ke SIINas | Jumlah Dokumen hasil pemantauan dan Evaluasi kepatuhan perusahaan industri dan perusahaan kawasan industri lingkup kabupaten/kota dalam penyampaian data ke SIINas |  | 1 dokumen | 35.000.000 |  |
| - | Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan analisis data industri, data Kawasan Industri Serta data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) | Jumlah Dokumen hasil fiasilitasi pengumpulan, Pengolahan dan analisis data industri, data kawasan industri serta data lain lingkup kabupaten/kota melalui sistem informasi industri nasional (SIINas) |  | 1 dokumen | 61.455.000 |  |
| **JUMLAH TOTAL** | | | | | **30.594.567.596** |  |

**Rancangan Akhir Renja DISDAGKOPRINUM Tahun 2025**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Kode** | | | | | **Uraian** | **Sumber Dana** | **Lokasi** | **Jumlah** | | | | | | |
| **Tahun - 1** | **Tahun N** | | | | | **Tahun + 1** |
| **Belanja Operasi** | **Belanja Modal** | **Belanja Tidak Terduga** | **Belanja Transfer** | **Jumlah (Rp)** |
| Dinas Perdagangan, Koperasi, UKM Dan Perindustrian | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 |  |  |  |  | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 17 |  |  |  | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 17 | 02 |  |  | PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM |  |  |  | Rp. 27.668.500,00 | Rp. 0,00 | Rp. 0,00 | Rp. 0,00 | Rp. 27.668.500,00 | Rp. 38.923.680,00 |
| 2 | 17 | 02 | 2.01 |  | Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota |  |  |  | Rp. 27.668.500,00 | Rp. 0,00 | Rp. 0,00 | Rp. 0,00 | Rp. 27.668.500,00 | Rp. 38.923.680,00 |
| 2 | 17 | 02 | 2.01 | 0001 | Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Kab. Luwu Timur, Malili, Puncuk Indah |  | Rp. 27.668.500,00 | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 27.668.500,00 | Rp. 38.923.680,00 |
| 2 | 17 | 03 |  |  | PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI |  |  |  | Rp. 327.860.600,00 | Rp. 0,00 | Rp. 0,00 | Rp. 0,00 | Rp. 327.860.600,00 | Rp. 120.000.000,00 |
| 2 | 17 | 03 | 2.01 |  | Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota |  |  |  | Rp. 327.860.600,00 | Rp. 0,00 | Rp. 0,00 | Rp. 0,00 | Rp. 327.860.600,00 | Rp. 120.000.000,00 |
| 2 | 17 | 03 | 2.01 | 0004 | Pelaksanaan Proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Kab. Luwu Timur, Malili, Puncuk Indah |  | Rp. 327.860.600,00 | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 327.860.600,00 | Rp. 120.000.000,00 |
| 2 | 17 | 04 |  |  | PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI |  |  |  | Rp. 79.093.100,00 | Rp. 0,00 | Rp. 0,00 | Rp. 0,00 | Rp. 79.093.100,00 | Rp. 91.192.884,00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 17 | 04 | 2.01 |  | Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaanya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota |  |  |  | Rp. 79.093.100,00 | Rp. 0,00 | Rp. 0,00 | Rp. 0,00 | Rp. 79.093.100,00 | Rp. 91.192.884,00 |
| 2 | 17 | 04 | 2.01 | 0001 | Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Kab. Luwu Timur, Malili, Malili |  | Rp. 79.093.100,00 | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 79.093.100,00 | Rp. 91.192.884,00 |
| 2 | 17 | 05 |  |  | PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN |  |  |  | Rp. 216.065.500,00 | Rp. 0,00 | Rp. 0,00 | Rp. 0,00 | Rp. 216.065.500,00 | Rp. 93.445.354,00 |
| 2 | 17 | 05 | 2.01 |  | Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota |  |  |  | Rp. 216.065.500,00 | Rp. 0,00 | Rp. 0,00 | Rp. 0,00 | Rp. 216.065.500,00 | Rp. 93.445.354,00 |
| 2 | 17 | 05 | 2.01 | 0001 | Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Kab. Luwu Timur, Malili, Puncuk Indah |  | Rp. 216.065.500,00 | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 216.065.500,00 | Rp. 93.445.354,00 |
| 2 | 17 | 06 |  |  | PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI |  |  |  | Rp. 37.323.500,00 | Rp. 0,00 | Rp. 0,00 | Rp. 0,00 | Rp. 37.323.500,00 | Rp. 41.243.790,00 |
| 2 | 17 | 06 | 2.01 |  | Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota |  |  |  | Rp. 37.323.500,00 | Rp. 0,00 | Rp. 0,00 | Rp. 0,00 | Rp. 37.323.500,00 | Rp. 41.243.790,00 |
| 2 | 17 | 06 | 2.01 | 0005 | Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Kab. Luwu Timur, Malili, Puncuk Indah |  | Rp. 37.323.500,00 | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 37.323.500,00 | Rp. 41.243.790,00 |
| 2 | 17 | 07 |  |  | PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM) |  |  |  | Rp. 580.404.000,00 | Rp. 0,00 | Rp. 0,00 | Rp. 0,00 | Rp. 580.404.000,00 | Rp. 284.402.749,00 |
| 2 | 17 | 07 | 2.01 |  | Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan |  |  |  | Rp. 580.404.000,00 | Rp. 0,00 | Rp. 0,00 | Rp. 0,00 | Rp. 580.404.000,00 | Rp. 284.402.749,00 |
| 2 | 17 | 07 | 2.01 | 0002 | Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa |  | Rp. 24.577.000,00 | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 24.577.000,00 | Rp. 42.906.925,00 |
| 2 | 17 | 07 | 2.01 | 0003 | Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa |  | Rp. 39.878.000,00 | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 39.878.000,00 | Rp. 34.038.150,00 |
| 2 | 17 | 07 | 2.01 | 0004 | Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa |  | Rp. 405.502.000,00 | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 405.502.000,00 | Rp. 79.836.440,00 |
| 2 | 17 | 07 | 2.01 | 0005 | Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa |  | Rp. 46.225.000,00 | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 46.225.000,00 | Rp. 75.348.700,00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 17 | 07 | 2.01 | 0014 | Penyusunan Basis Data Usaha Mikro | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa |  | Rp. 64.222.000,00 | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 64.222.000,00 | Rp. 52.272.534,00 |
| 2 | 17 | 08 |  |  | PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM |  |  |  | Rp. 269.576.000,00 | Rp. 0,00 | Rp. 0,00 | Rp. 0,00 | Rp. 269.576.000,00 | Rp. 132.462.660,00 |
| 2 | 17 | 08 | 2.01 |  | Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil |  |  |  | Rp. 269.576.000,00 | Rp. 0,00 | Rp. 0,00 | Rp. 0,00 | Rp. 269.576.000,00 | Rp. 132.462.660,00 |
| 2 | 17 | 08 | 2.01 | 0006 | Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa |  | Rp. 269.576.000,00 | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 269.576.000,00 | Rp. 132.462.660,00 |
| 2 | 17 | 01 |  |  | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA |  |  |  | Rp. 5.065.884.497,00 | Rp. 68.500.000,00 | Rp. 0,00 | Rp. 0,00 | Rp. 5.202.304.497,00 | Rp. 4.404.976.896,00 |
| 2 | 17 | 01 | 2.01 |  | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah |  |  |  | Rp. 77.031.800,00 | Rp. 0,00 | Rp. 0,00 | Rp. 0,00 | Rp. 86.031.800,00 | Rp. 69.099.699,00 |
| 2 | 17 | 01 | 2.01 | 0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa |  | Rp. 36.928.200,00 | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 45.928.200,00 | Rp. 24.069.700,00 |
| 2 | 17 | 01 | 2.01 | 0002 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Kab. Luwu Timur, Malili, Puncuk Indah |  | Rp. 3.112.300,00 | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 3.112.300,00 | Rp. 3.463.806,00 |
| 2 | 17 | 01 | 2.01 | 0004 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Kab. Luwu Timur, Malili, Puncuk Indah |  | Rp. 3.110.000,00 | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 3.110.000,00 | Rp. 2.925.653,00 |
| 2 | 17 | 01 | 2.01 | 0007 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Kab. Luwu Timur, Malili, Puncuk Indah |  | Rp. 33.881.300,00 | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 33.881.300,00 | Rp. 38.640.540,00 |
| 2 | 17 | 01 | 2.02 |  | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah |  |  |  | Rp. 4.139.460.077,00 | Rp. 0,00 | Rp. 0,00 | Rp. 0,00 | Rp. 4.173.540.077,00 | Rp. 3.428.269.875,00 |
| 2 | 17 | 01 | 2.02 | 0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)  Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Kab. Luwu Timur, Malili, Puncuk Indah |  | Rp. 4.058.018.277,00 | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 4.058.018.277,00 | Rp. 3.391.933.975,00 |
| 2 | 17 | 01 | 2.02 | 0007 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa |  | Rp. 81.441.800,00 | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 115.521.800,00 | Rp. 36.335.900,00 |
| 2 | 17 | 01 | 2.03 |  | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah |  |  |  | Rp. 17.525.000,00 | Rp. 0,00 | Rp. 0,00 | Rp. 0,00 | Rp. 35.525.000,00 | Rp. 19.460.000,00 |
| 2 | 17 | 01 | 2.03 | 0006 | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa |  | Rp. 17.525.000,00 | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 35.525.000,00 | Rp. 19.460.000,00 |

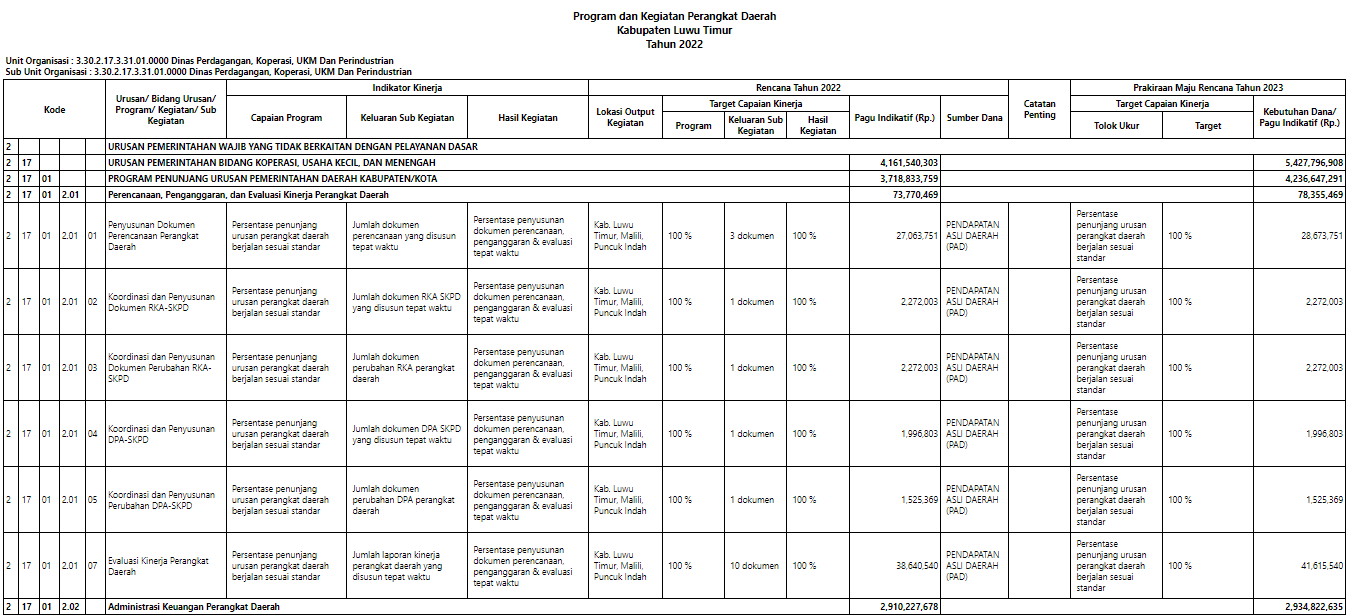
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 17 | 01 | 2.04 |  | Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah |  |  |  | Rp. 1.684.000,00 | Rp. 0,00 | Rp. 0,00 | Rp. 0,00 | Rp. 8.524.000,00 | Rp. 5.786.600,00 |
| 2 | 17 | 01 | 2.04 | 0007 | Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Kab. Luwu Timur, Malili, Puncuk Indah |  | Rp. 1.684.000,00 | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 8.524.000,00 | Rp. 5.786.600,00 |
| 2 | 17 | 01 | 2.05 |  | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah |  |  |  | Rp. 189.981.000,00 | Rp. 0,00 | Rp. 0,00 | Rp. 0,00 | Rp. 189.981.000,00 | Rp. 155.451.425,00 |
| 2 | 17 | 01 | 2.05 | 0002 | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Kab. Luwu Timur, Malili, Puncuk Indah |  | Rp. 72.700.000,00 | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 72.700.000,00 | Rp. 26.800.000,00 |
| 2 | 17 | 01 | 2.05 | 0003 | Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Kab. Luwu Timur, Malili, Puncuk Indah |  | Rp. 13.495.000,00 | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 13.495.000,00 | Rp. 25.621.425,00 |
| 2 | 17 | 01 | 2.05 | 0009 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Kab. Luwu Timur, Malili, Puncuk Indah |  | Rp. 31.025.000,00 | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 31.025.000,00 | Rp. 59.400.000,00 |
| 2 | 17 | 01 | 2.05 | 0011 | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Kab. Luwu Timur, Malili, Puncuk Indah |  | Rp. 72.761.000,00 | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 72.761.000,00 | Rp. 43.630.000,00 |
| 2 | 17 | 01 | 2.06 |  | Administrasi Umum Perangkat Daerah |  |  |  | Rp. 385.761.120,00 | Rp. 0,00 | Rp. 0,00 | Rp. 0,00 | Rp. 385.761.120,00 | Rp. 409.084.200,00 |
| 2 | 17 | 01 | 2.06 | 0001 | Penyediaan Komponen Instalasi  Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Kab. Luwu Timur, Malili, Puncuk Indah |  | Rp. 2.678.000,00 | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 2.678.000,00 | Rp. 2.681.200,00 |
| 2 | 17 | 01 | 2.06 | 0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Kab. Luwu Timur, Malili, Puncuk Indah |  | Rp. 750.000,00 | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 750.000,00 | Rp. 15.000.000,00 |
| 2 | 17 | 01 | 2.06 | 0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Kab. Luwu Timur, Malili, Puncuk Indah |  | Rp. 4.523.520,00 | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 4.523.520,00 | Rp. 3.263.000,00 |
| 2 | 17 | 01 | 2.06 | 0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Kab. Luwu Timur, Malili, Puncuk Indah |  | Rp. 7.653.200,00 | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 7.653.200,00 | Rp. 12.800.000,00 |
| 2 | 17 | 01 | 2.06 | 0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Kab. Luwu Timur, Malili, Puncuk Indah |  | Rp. 7.920.000,00 | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 7.920.000,00 | Rp. 7.320.000,00 |
| 2 | 17 | 01 | 2.06 | 0008 | Fasilitasi Kunjungan Tamu | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Kab. Luwu Timur, Malili, Puncuk Indah |  | Rp. 8.050.000,00 | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 8.050.000,00 | Rp. 4.000.000,00 |
| 2 | 17 | 01 | 2.06 | 0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Puncuk Indah |  | Rp. 328.186.400,00 | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 328.186.400,00 | Rp. 350.020.000,00 |
| 2 | 17 | 01 | 2.06 | 0010 | Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Kab. Luwu Timur, Malili, Puncuk Indah |  | Rp. 26.000.000,00 | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 26.000.000,00 | Rp. 14.000.000,00 |

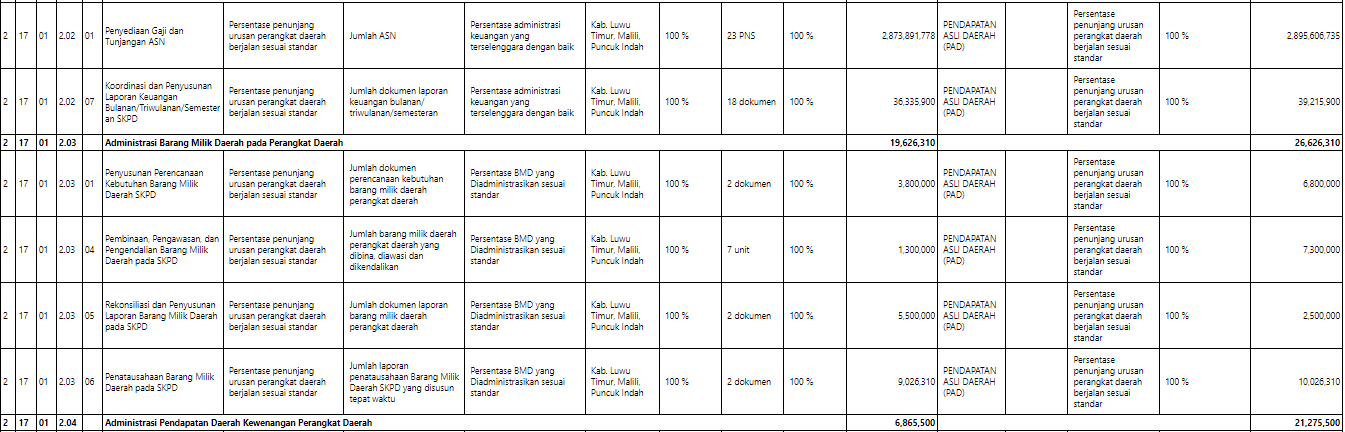
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 17 | 01 | 2.07 |  | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah |  |  |  | Rp. 0,00 | Rp. 68.500.000,00 | Rp. 0,00 | Rp. 0,00 | Rp. 68.500.000,00 | Rp. 73.519.236,00 |
| 2 | 17 | 01 | 2.07 | 0005 | Pengadaan Mebel | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Kab. Luwu Timur, Malili, Puncuk Indah |  | Rp. 0 | Rp. 12.000.000,00 | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 12.000.000,00 | Rp. 37.499.736,00 |
| 2 | 17 | 01 | 2.07 | 0006 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Kab. Luwu Timur, Malili, Puncuk Indah |  | Rp. 0 | Rp. 38.500.000,00 | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 38.500.000,00 | Rp. 30.000.000,00 |
| 2 | 17 | 01 | 2.07 | 0011 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Kab. Luwu Timur, Malili, Puncuk Indah |  | Rp. 0 | Rp. 18.000.000,00 | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 18.000.000,00 | Rp. 6.019.500,00 |
| 2 | 17 | 01 | 2.08 |  | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah |  |  |  | Rp. 137.921.500,00 | Rp. 0,00 | Rp. 0,00 | Rp. 0,00 | Rp. 137.921.500,00 | Rp. 137.185.861,00 |
| 2 | 17 | 01 | 2.08 | 0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Kab. Luwu Timur, Malili, Puncuk Indah |  | Rp. 7.721.500,00 | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 7.721.500,00 | Rp. 985.861,00 |
| 2 | 17 | 01 | 2.08 | 0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Kab. Luwu Timur, Malili, Puncuk Indah |  | Rp. 74.400.000,00 | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 74.400.000,00 | Rp. 68.400.000,00 |
| 2 | 17 | 01 | 2.08 | 0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Kab. Luwu Timur, Malili, Puncuk Indah |  | Rp. 55.800.000,00 | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 55.800.000,00 | Rp. 67.800.000,00 |
| 2 | 17 | 01 | 2.09 |  | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah |  |  |  | Rp. 116.520.000,00 | Rp. 0,00 | Rp. 0,00 | Rp. 0,00 | Rp. 116.520.000,00 | Rp. 107.120.000,00 |
| 2 | 17 | 01 | 2.09 | 0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Kab. Luwu Timur, Malili, Puncuk Indah |  | Rp. 58.700.000,00 | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 58.700.000,00 | Rp. 58.850.000,00 |
| 2 | 17 | 01 | 2.09 | 0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Kab. Luwu Timur, Malili, Puncuk Indah |  | Rp. 27.820.000,00 | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 27.820.000,00 | Rp. 28.270.000,00 |
| 2 | 17 | 01 | 2.09 | 0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Kab. Luwu Timur, Malili, Puncuk Indah |  | Rp. 30.000.000,00 | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 30.000.000,00 | Rp. 20.000.000,00 |
| 3 |  |  |  |  | URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 30 |  |  |  | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 30 | 03 |  |  | PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN |  |  |  | Rp. 727.134.400,00 | Rp. 20.750.000.000,00 | Rp. 0,00 | Rp. 0,00 | Rp. 21.477.134.400,00 | Rp. 3.069.463.175,00 |
| 3 | 30 | 03 | 2.01 |  | Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan |  |  |  | Rp. 385.420.000,00 | Rp. 20.750.000.000,00 | Rp. 0,00 | Rp. 0,00 | Rp. 21.135.420.000,00 | Rp. 3.034.453.800,00 |
| 3 | 30 | 03 | 2.01 | 0001 | Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Kab. Luwu Timur, Tomoni, Tomoni |  | Rp. 385.420.000,00 | Rp. 20.750.000.000,00 | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 21.135.420.000,00 | Rp. 3.034.453.800,00 |

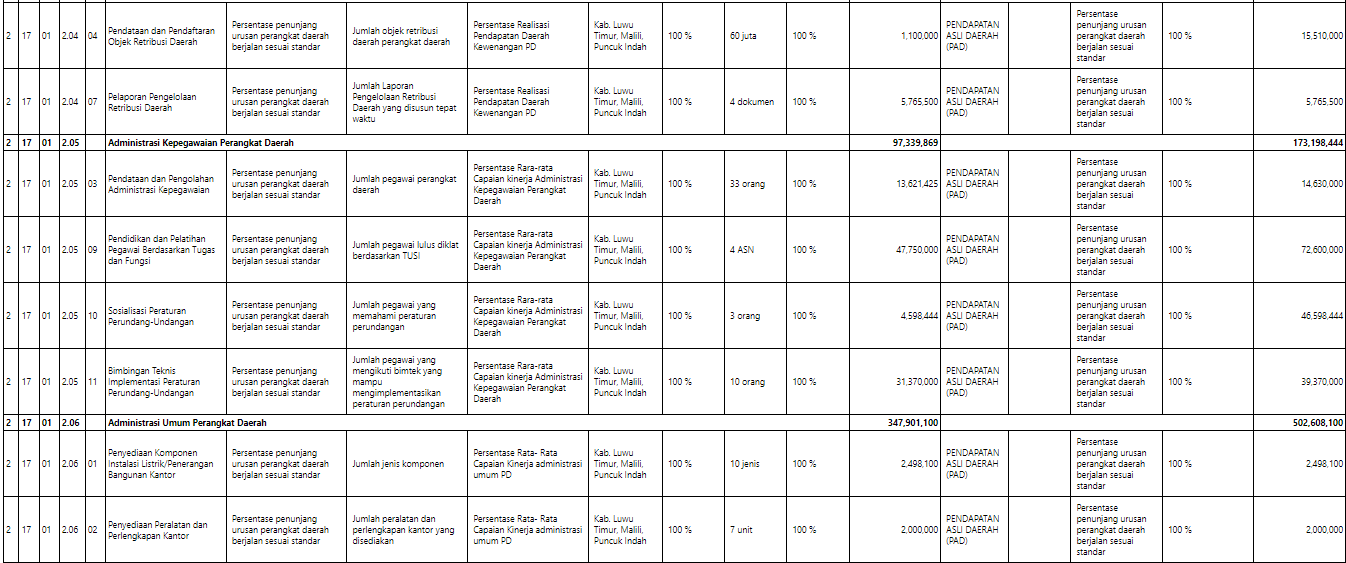
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | 30 | 03 | 2.02 |  | Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya |  |  |  | Rp. 341.714.400,00 | Rp. 0,00 | Rp. 0,00 | Rp. 0,00 | Rp. 341.714.400,00 | Rp. 35.009.375,00 |
| 3 | 30 | 03 | 2.02 | 0001 | Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa |  | Rp. 341.714.400,00 | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 341.714.400,00 | Rp. 35.009.375,00 |
| 3 | 30 | 04 |  |  | PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING |  |  |  | Rp. 512.823.156,00 | Rp. 0,00 | Rp. 0,00 | Rp. 0,00 | Rp. 512.823.156,00 | Rp. 462.873.635,00 |
| 3 | 30 | 04 | 2.02 |  | Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota |  |  |  | Rp. 485.933.600,00 | Rp. 0,00 | Rp. 0,00 | Rp. 0,00 | Rp. 485.933.600,00 | Rp. 435.973.899,00 |
| 3 | 30 | 04 | 2.02 | 0002 | Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa |  | Rp. 85.485.200,00 | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 85.485.200,00 | Rp. 85.485.420,00 |
| 3 | 30 | 04 | 2.02 | 0003 | Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa |  | Rp. 400.448.400,00 | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 400.448.400,00 | Rp. 350.488.479,00 |
| 3 | 30 | 04 | 2.03 |  | Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota |  |  |  | Rp. 26.889.556,00 | Rp. 0,00 | Rp. 0,00 | Rp. 0,00 | Rp. 26.889.556,00 | Rp. 26.899.736,00 |
| 3 | 30 | 04 | 2.03 | 0003 | Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa |  | Rp. 26.889.556,00 | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 26.889.556,00 | Rp. 26.899.736,00 |
| 3 | 30 | 05 |  |  | PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR |  |  |  | Rp. 313.262.443,00 | Rp. 0,00 | Rp. 0,00 | Rp. 0,00 | Rp. 313.262.443,00 | Rp. 395.616.000,00 |
| 3 | 30 | 05 | 2.01 |  | Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat pada 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota |  |  |  | Rp. 313.262.443,00 | Rp. 0,00 | Rp. 0,00 | Rp. 0,00 | Rp. 313.262.443,00 | Rp. 395.616.000,00 |
| 3 | 30 | 05 | 2.01 | 0002 | Pameran Dagang Nasional | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa |  | Rp. 179.640.918,00 | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 179.640.918,00 | Rp. 250.000.000,00 |
| 3 | 30 | 05 | 2.01 | 0003 | Pameran Dagang Lokal | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa |  | Rp. 35.930.000,00 | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 35.930.000,00 | Rp. 40.000.000,00 |
| 3 | 30 | 05 | 2.01 | 0004 | Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa |  | Rp. 79.465.000,00 | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 79.465.000,00 | Rp. 79.465.000,00 |
| 3 | 30 | 05 | 2.01 | 0005 | Peningkatan Citra Produk Ekspor | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa |  | Rp. 18.226.525,00 | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 18.226.525,00 | Rp. 26.151.000,00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | 30 | 06 |  |  | PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN |  |  |  | Rp. 157.366.100,00 | Rp. 0,00 | Rp. 0,00 | Rp. 0,00 | Rp. 157.366.100,00 | Rp. 188.857.100,00 |
| 3 | 30 | 06 | 2.01 |  | Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan |  |  |  | Rp. 157.366.100,00 | Rp. 0,00 | Rp. 0,00 | Rp. 0,00 | Rp. 157.366.100,00 | Rp. 188.857.100,00 |
| 3 | 30 | 06 | 2.01 | 0001 | Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa |  | Rp. 157.366.100,00 | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 157.366.100,00 | Rp. 188.857.100,00 |
| 3 | 31 |  |  |  | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 31 | 02 |  |  | PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI |  |  |  | Rp. 899.973.800,00 | Rp. 0,00 | Rp. 0,00 | Rp. 0,00 | Rp. 899.973.800,00 | Rp. 615.288.670,00 |
| 3 | 31 | 02 | 2.01 |  | Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota |  |  |  | Rp. 899.973.800,00 | Rp. 0,00 | Rp. 0,00 | Rp. 0,00 | Rp. 899.973.800,00 | Rp. 615.288.670,00 |
| 3 | 31 | 02 | 2.01 | 0003 | Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa |  | Rp. 457.714.300,00 | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 457.714.300,00 | Rp. 177.328.860,00 |
| 3 | 31 | 02 | 2.01 | 0005 | Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa |  | Rp. 52.889.500,00 | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 52.889.500,00 | Rp. 47.959.810,00 |
| 3 | 31 | 02 | 2.01 | 0006 | Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa |  | Rp. 389.370.000,00 | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 389.370.000,00 | Rp. 390.000.000,00 |
| 3 | 31 | 03 |  |  | PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI |  |  |  | Rp. 34.541.000,00 | Rp. 0,00 | Rp. 0,00 | Rp. 0,00 | Rp. 34.541.000,00 | Rp. 45.000.000,00 |
| 3 | 31 | 03 | 2.01 |  | Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota |  |  |  | Rp. 34.541.000,00 | Rp. 0,00 | Rp. 0,00 | Rp. 0,00 | Rp. 34.541.000,00 | Rp. 45.000.000,00 |
| 3 | 31 | 03 | 2.01 | 0003 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha sektor perindustrian yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa |  | Rp. 34.541.000,00 | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 34.541.000,00 | Rp. 45.000.000,00 |
| 3 | 31 | 04 |  |  | PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL |  |  |  | Rp. 72.671.000,00 | Rp. 0,00 | Rp. 0,00 | Rp. 0,00 | Rp. 72.671.000,00 | Rp. 101.018.510,00 |
| 3 | 31 | 04 | 2.01 |  | Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota |  |  |  | Rp. 72.671.000,00 | Rp. 0,00 | Rp. 0,00 | Rp. 0,00 | Rp. 72.671.000,00 | Rp. 101.018.510,00 |
| 3 | 31 | 04 | 2.01 | 0001 | Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa |  | Rp. 37.671.000,00 | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 37.671.000,00 | Rp. 51.018.510,00 |

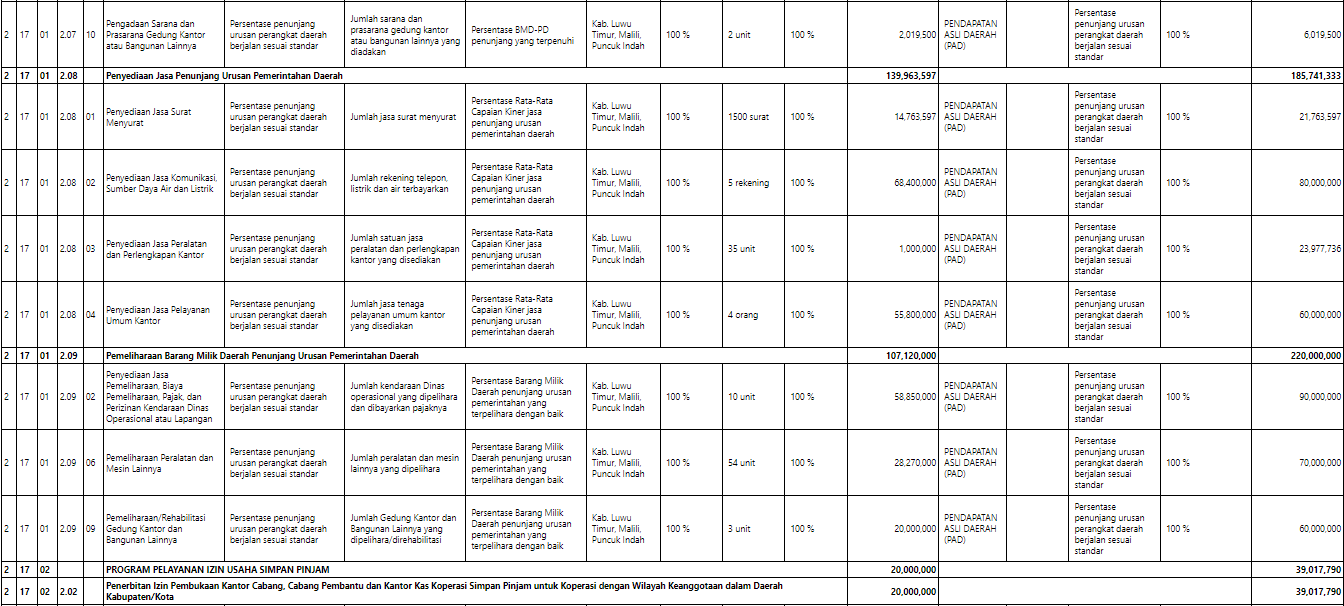
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Kode** | | | | | **Uraian** | **Sumber Dana** | **Lokasi** | **Jumlah** | | | | | | |
| **Tahun - 1** | **Tahun N** | | | | | **Tahun + 1** |
| **Belanja Operasi** | **Belanja Modal** | **Belanja Tidak Terduga** | **Belanja Transfer** | **Jumlah (Rp)** |
| 3 | 31 | 04 | 2.01 | 0003 | Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Kabupaten/Kota dalam Penyampaian Data ke SIINas | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Kab. Luwu Timur, Malili, Puncuk Indah |  | Rp. 35.000.000,00 | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 35.000.000,00 | Rp. 50.000.000,00 |
| **Jumlah** | | | | | | | |  | **Rp. 9.321.647.596,00** | **Rp. 20.818.500.000,00** |  |  | **Rp. 30.208.067.596,00** | **Rp. 10.084.765.103,00** |

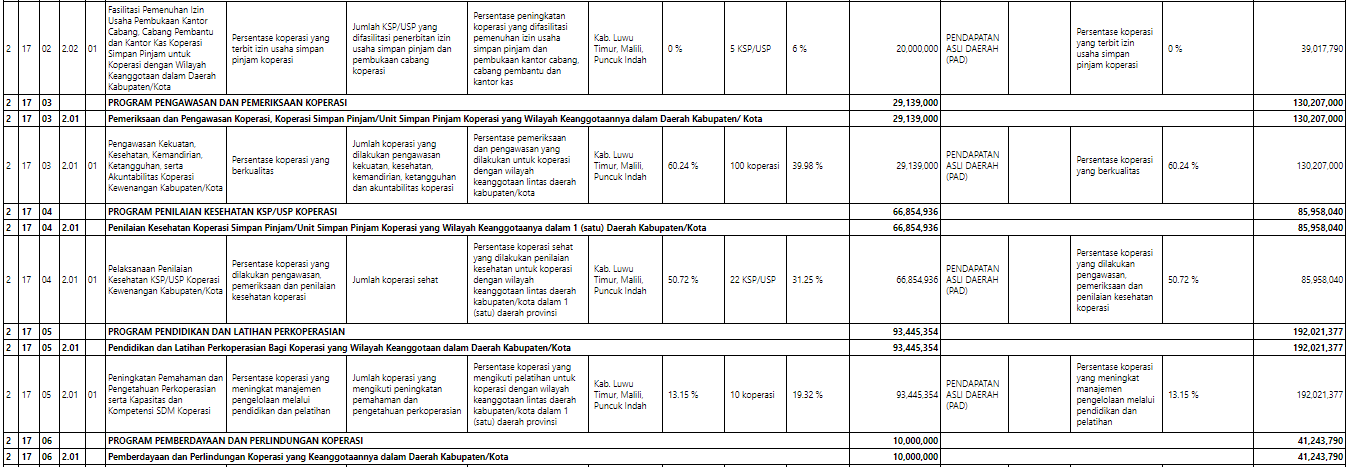


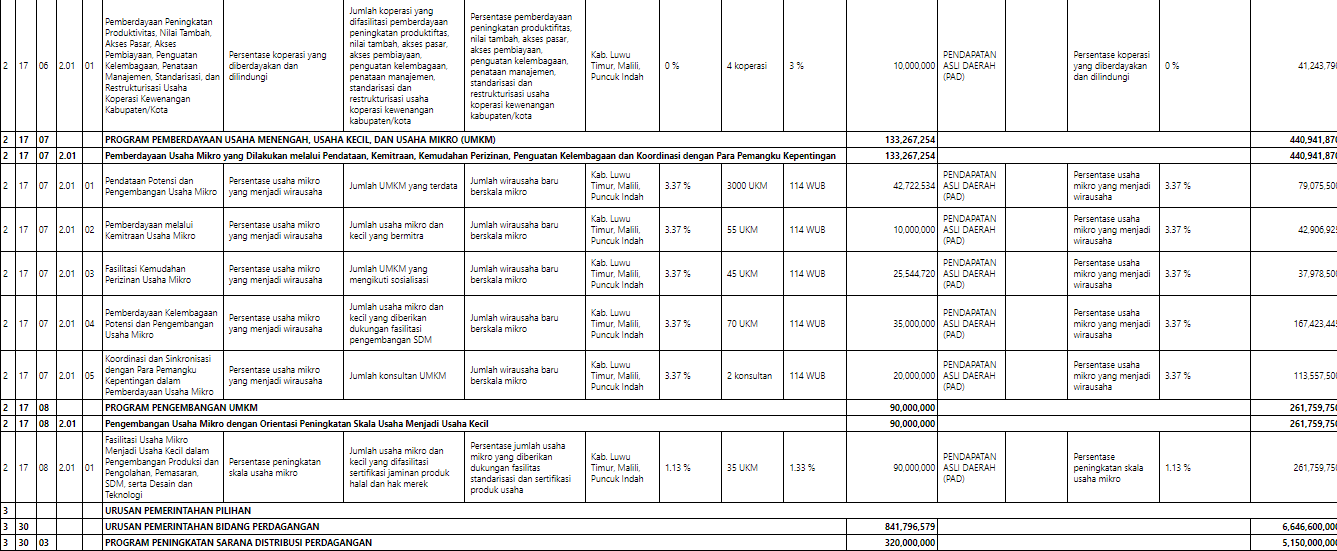


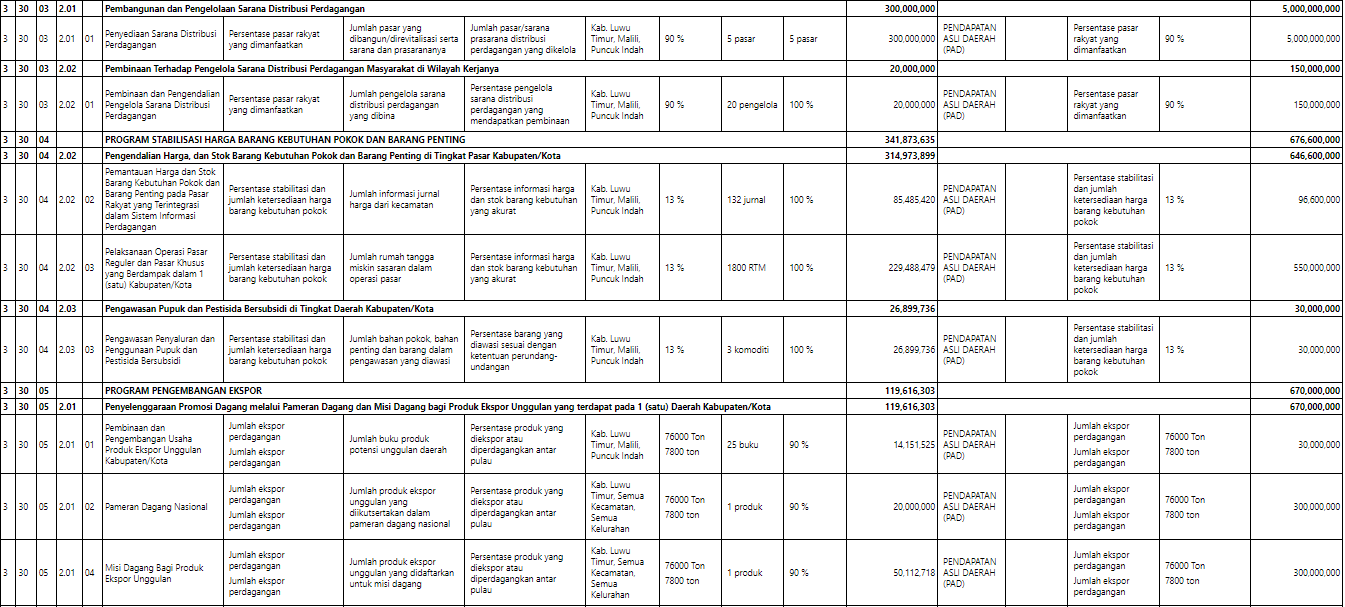


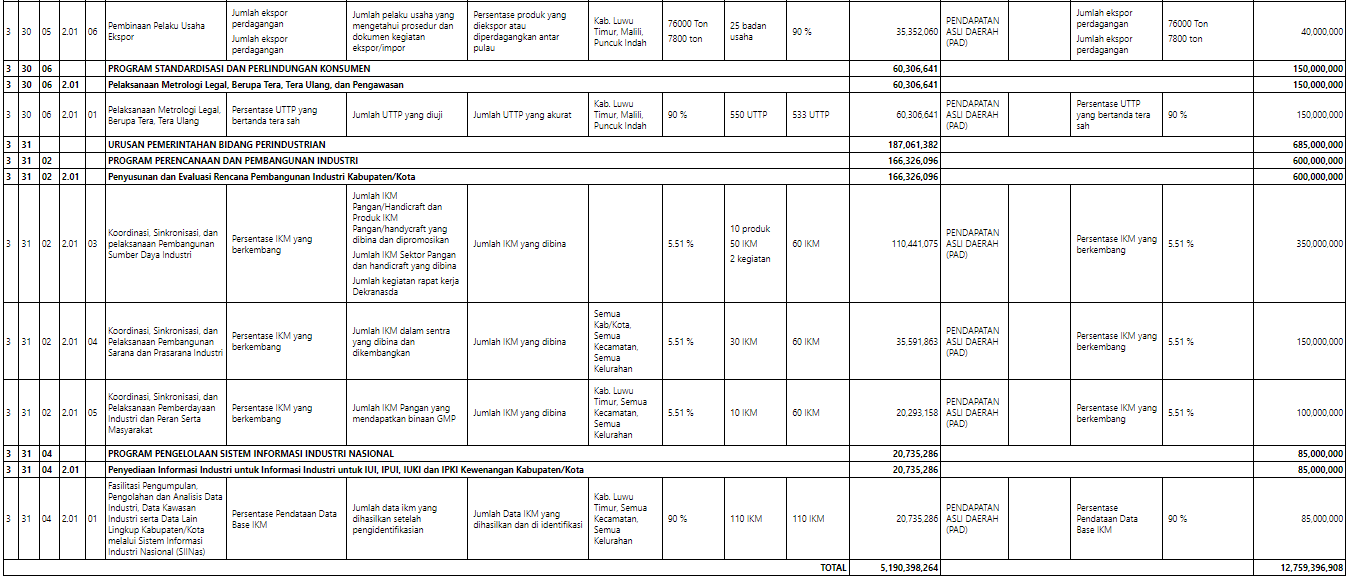












# BAB VI PENUTUP

Pedoman ini menjadi penting karena diperlukan suatu acuan yang jelas dalam perencanaan kinerja dalam rangka mencapai target Kinerja Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kabupaten Luwu Timur Tahun 2025. Disamping itu, pedoman ini juga sebagai salah satu komponen dalam yang membentuk Sistem AKIP. Dikarenakan belum optimalnya pengukuran kinerja yang dilakukan pada Lingkup Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian, maka diharapkan pedoman/panduan ini dapat dijadikan acuan/panduan dan dapat diterapkan dengan baik. Lebih lanjut pedoman/panduan ini dimaksudkan agar selain digunakan sebagai dasar pelaporan, juga untuk pengendalian dan pemantauan secara berkala oleh pimpinan unit kerja.